



# **HIMPUNAN HASIL PENELITIAN TAHUN 2022**



**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

# **HIMPUNAN HASIL PENELITIAN TAHUN 2022**



**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## DAFTAR ISI

I. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan .....	1
II. Kajian Upaya Penanganan Anjal, Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Sulawesi Selatan .....	4
III. Studi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Punagaan Berbasis Wisata di Kabupaten Selayar .....	6
IV. Studi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bahuluang Berbasis Wisata di Kabupaten Selayar .....	8
V. Kajian tentang Pengembangan Ekowisata di Daerah Pesisir di Kepulauan Sulawesi Selatan .....	9
VI. Kajian Reformasi Kebijakan "New Normal Tourism" dalam Peningkatan Ekonomi Sektor Pariwisata di Sulawesi Selatan .....	14
VII. Kajian Rantai Nilai Agrowisata berbasis Pedesaan di TWA Malino Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan .....	17
VIII. Analisis Penilaian Kinerja berdasarkan Balanced Score Card di Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .....	20
IX. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Hilirisasi Pengelolaan Industri Kreatif di Sulawesi Selatan .....	23
X. Penelitian Pengembangan Bibit Porang Super <i>Amorphophallus muelleri</i> Blume Sulawesi Selatan Berbasis Teknologi Biofertilizer Mikrobioma .....	27
XI. Kajian Pengembangan dan Budidaya Jeruk Pangkep .....	31
XII. Kajian Pengembangan Kawasan Perkebunan Jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	34
XIII. Analisis PAD Pelabuhan Perikanan Di Sulawesi Selatan (Strategi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Di Sulawesi Selatan Untuk Peningkatan PAD) .....	36
XIV. Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bantaeng .....	38
XV. Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bulukumba .....	41
XVI. Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Sinjai .....	44
XVII. Hak Kekayaan Intelektual Produk Kopi Latimojong Luwu (HAKI) ..	47
XVIII. PROTOTYPE ALAT/MESIN ROASTING KOPI (SW-I / Mandiri) .....	50

# HIMPUNAN HASIL PENELITIAN TAHUN 2022

## I. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan

### a. Abstrak

Pada level Provinsi secara umum, tingkat kepuasan masyarakat Sulawesi Selatan dengan kinerja pembangunan berada pada level 48,5%. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah penting untuk memenuhi ekspektasi publik dengan menyelesaikan atau minimal memperbaiki hal-hal yang dianggap menjadi masalah krusial bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode survey Multistage Random Sampling yang diambil secara proporsional berjumlah 1.200 responden. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan metode Importance and Performance Analysis (IPA), pendekatan ini berguna untuk memahami kepuasan masyarakat terhadap kinerja daerah. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa isu strategis yang masih dipersepsikan masyarakat perlu diperbaiki adalah infrastruktur jalan, kemiskinan, penyaluran bantuan sosial seperti Raskin dan BLT, Ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan, serta pengangguran dan lapangan pekerjaan. Adapun kinerja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu terus dipertahankan adalah dalam bidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.

### b. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan inti dari modernisasi sektor publik (Walle and Bouckaert 2007). Ketidakpercayaan publik seringkali dikaitkan dengan buruknya fungsi layanan publik. Dalam konteks wacana politik, pelayanan publik yang berfungsi dengan baik dikatakan apabila menciptakan kepercayaan kepada pemerintah. Walle dan Bouckaert (2007) juga mengatakan bahwa kinerja administrasi publik memiliki dampak tertentu pada kepercayaan terhadap pemerintah, tetapi tingkat kepercayaan yang ada pada pemerintah juga berdampak pada

kepuasan kinerja pemerintah. Terjadi kausalitas di antara kinerja dan 'kepercayaan publik.

Hubungan kinerja dan kepercayaan masyarakat tidak cukup hanya mengukur evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan membandingkannya dengan kepercayaan masyarakat di pemerintah. Untuk meningkatkan legitimasi pemerintah dengan memodernisasi layanan publik hanyalah strategi parsial karena kinerja aktual tidak sama dengan kinerja yang dirasakan, karena perbedaan mungkin ada di benak masyarakat tentang definisi dan kebutuhan kinerja layanan publik. Fokus pada kinerja saja tidak akan cukup, karena persepsi dan definisi kinerja tidak hanya tercipta dalam interaksi pemerintah-masyarakat, tetapi juga dalam hubungan warga sehari-hari. Memulihkan kepercayaan pada pemerintah tidak bisa hanya didasarkan pada rencana aksi manajerial tetapi juga membutuhkan rekayasa sosial. Oleh karena itu, pertanyaan intinya adalah bagaimana pemerintah dapat mengubah kepuasan dan kriteria evaluasi ini dengan cara yang dapat diterima dalam masyarakat demokratis seperti di Indonesia.

Dalam kerangka ini, Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan bertujuan untuk memperoleh penilaian masyarakat terhadap pembangunan yang telah dikerjakan dan untuk mengetahui permasalahan utama yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun survey ini juga diharapkan akan diperoleh preferensi masyarakat dalam arah pembangunan selanjutnya.

Untuk mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Selatan dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022.

### **c. Rekomendasi**

- 1) Infrastruktur Jalan. Pada aspek ini setidaknya dua SKPD yang menjadi leading sector. SKPD yang menangani pekerjaan umum diharapkan, pertama, fokus kepada pelayanan infrastruktur di kabupaten/kota yang paling prioritas berdasarkan temuan IPA dan Sosialisasi before and after pekerjaan infrastruktur yang dianggap relatif bagus, namun namun tingkat kepuasaannya belum maksimal.
- 2) Kemiskinan. perlu adanya kajian efektivitas terhadap program penanggulangan kemiskinan secara khusus, sebagai upaya masukan kepada pemerintah pusat, dan bahan kebijakan menindaklanjuti dengan program turunan pemerintah provinsi dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kedua, Aktivasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan di provinsi Sulawesi selatan.
- 3) Penyaluran Bantuan Sosial, seperti raskin dan BLT. Penyaluran bantuan sosial seperti Raskin dan BLT. Pada poin ini, kebijakan yang perlu diambil oleh Dinas Sosial yaitu perlu mengevaluasi proses distribusi terhadap 25 program nasional berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya berkaitan dengan penyaluran raskin (BPNT, Beras Sejahtera, PKH, maupun bantuan-bantuan lainnya).

- 4) Ekonomi Masyarakat. Pada variable ini, pertama, diperlukannya harmonisasi dan koordinasi yang baik, karena isu ekonomi banyak berhubungan dengan berbagai SKPD dan tidak terkesan ego sektoral. Kedua, mengelaborasi Bersama stakeholder lainnya dalam upaya membangun kerja pemerintah dengan pendekatan collaborative Governance. Keempat, Pemerintah Provinsi memberi kemudahan dalam hal akses dan disbursement dana untuk penguatan ekonomi, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek good governance. Membangun suatu sistem yang terintegrasi, transparan, dan juga akuntabel sesuai tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan sehingga mengurangi kekakuan prosedur yang terjadi, sehingga program tersebut dapat optimal digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kelima, Mendesain program pemulihan ekonomi pasca COVID-19 berdasarkan kebutuhan (bottom up approach), salah satunya adalah harmonisasi dengan perbankan untuk sosialisasi berkaitan dengan restrukturisasi kredit serta kemudahan pembiayaan serta fleksibilitas program pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM. Keenam, Penguatan ekosistem digital dan Pemulihan sektor pariwisata. Program penguatan terhadap UMKM, perlu didorong tidak hanya dari informal ke formal, melainkan penguatan transformasi ke digital. Para pelaku usaha khususnya UMKM juga harus melakukan adaptasi teknologi dan digitalisasi baik dalam hal pelayanan maupun penjualan produk. Pembinaan dan pendampingan menyeluruh bagi UMKM perlu dilakukan, selain untuk mengurangi kesenjangan antar UMKM juga mendukung literasi teknologi bagi UMKM, sehingga pada akhirnya UMKM dapat mengembangkan produk lokal unggulan. Adapun dari Pemulihan sektor pariwisata adaptasi di destinasi wisata terhadap kondisi pandemi juga perlu dilakukan. Sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, pusat maupun pihak lain yang terkait menjadi mutlak diperlukan dalam rangka mendorong geliat pariwisata dan ekonomi kreatif
- 5) Kerusakan Lingkungan. Perlu memperketat perijinan tambang, khususnya yang sudah diserahkan menjadi kewenangan daerah yaitu perizinan tambang-tambang rakyat, sehingga kerusakan yang dihasilkan bisa terkendali. Adapun terkait banjir, perlu kerjasama dengan pemerintah kota setempat yang sering dilanda banjir dalam rangka memberikan Dana Bantuan Provinsi dalam penanggulangan Banjir.
- 6) Pengangguran dan lapangan pekerjaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam investasi publik jangka panjang sekaligus memperhatikan kesinambungan fiskal jangka Panjang, terlebih Kondisi paska pandemi menyebabkan terjadinya accidental transformation dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang menimbulkan potensi terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian.
- 7) Melakukan evaluasi terkait program isu strategis yang sudah menjadi program prioritas dan yang tidak masuk ke dalam program prioritas untuk menjadi perhatian dalam dua tahun ke depan.

## **II. Kajian Upaya Penanganan Anjal, Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Sulawesi Selatan**

### **a. Abstrak**

Anak jalan, gelandangan dan pengemis adalah masalah sosial yang sangat kompleks dan umumnya terjadi di wilayah urban. Studi ini bertujuan untuk memetakan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Mamminasata yang ada selama ini dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Sulawesi Selatan serta menganalisis implementasi kebijakan yang sudah ada. Selanjutnya mengidentifikasi dan memahami kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Mamminasata dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui metode wawancara, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dan studi dokumen. Data hasil wawancara dan FGD dianalisis dengan metode *interpretative* dan data studi dokumen dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini dilakukan sejak bulan April sampai Oktober 2022 di empat daerah wilayah Mamminasata yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Penelitian ini mengidentifikasi dua peraturan daerah yang mengatur penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Sulawesi Selatan. Kebijakan pertama adalah Perda Pemkot Makassar yang mengatur pembinaan anak jalanan, pengemis, gelandangan dan pengamen. Kebijakan kedua adalah peraturan daerah pemerintah provinsi tentang ketertiban umum dan ketenteran masyarakat. Kedua kebijakan ini belum diimplementasikan secara efektif dan belum berdampak pada penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di wilayah urban Sulawesi Selatan. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor yang menjadi kendala dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yaitu yaitu ketidakberfungsian keluarga, keterbatasan program, keterlibatan masyarakat dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Untuk itu, penelitian ini merekomendasi kebijakan pada level provinsi dan kabupaten/kota wilayah urban yang mengatur strategi koordinasi antar wilayah dan strategi program preventif, kuratif dan rehabilitative dalam penanganan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan di Sulawesi Selatan.

### **b. Latar Belakang**

Fenomena anak jalanan adalah suatu permasalahan sosial yang memerlukan penanganan secara serius. Aktivitas mengemis di jalan yang dilakukan oleh anak-anak di usia sekolah dapat dikategorikan sebagai sebuah ancaman bagi proses pembentukan *human capital* di usia perkembangan anak, mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya potensi yang dimiliki oleh anak untuk menambah kapasitas intelektual mereka dengan mengenyam pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya potensi dimana anak-anak yang masih berada di usia sekolah harus mensubstitusikan waktu dan sumber daya yang mereka miliki untuk belajar untuk digunakan dalam aktivitas mengemis. Akibatnya, capaian pendidikan yang dimiliki oleh seorang anak

dapat saja menjadi lebih rendah, atau bahkan dalam kasus yang lebih buruk, seorang anak dapat saja tidak melanjutkan pendidikannya disebabkan oleh keputusan tersebut.

Tentu saja hal ini akan membawa implikasi yang bersifat jangka panjang. Rendahnya tingkat pendidikan anak akan membawa konsekuensi berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh tingkat produktivitas di masa yang akan datang. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat pekerjaan yang mensyaratkan tingkat produktivitas yang tinggi mayoritas memerlukan kualifikasi human capital yang juga tinggi, yang dibuktikan dengan capaian level pendidikan yang mumpuni.

Adanya keterbatasan akses dalam labor market ini pada akhirnya akan membawa seorang anak yang putus sekolah atau memiliki capaian tingkat pendidikan yang rendah untuk terhalang dalam mendapatkan pekerjaan dengan tingkat gaji yang tinggi, dan apada akhirnya akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Adanya kebijakan preventif yang kemudian dapat mencegah atau meminimalisir tingkat keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis atau mengamen di jalan kemudian sangat perlu untuk diinisiasikan. Kebijakan tersebut diperlukan agar dapat meredam pengaruh negatif yang mungkin disebabkan oleh tekanan ekonomi, minimnya pengetahuan dan preferensi keluarga akan pendidikan anak, pengaruh pergaulan di lingkungan dengan eksposur pendidikan yang rendah, serta sejumlah faktor sosial ekonomi lainnya yang kemudian juga turut mempengaruhi keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis di jalan.

Kesenjangan sosial dan kemiskinan menjadi salah satu pemicu maraknya anak jalanan dan gelandangan menjadi betah untuk bertahan di skala kelas sosial mereka (Purwoko, 2013; Bahfiarti et al., 2019). Kondisi ini diperparah sejak pandemic COVID- 19 melanda seluruh negara berakibat pada perekonomian global, nasional dan lokal melambat yang memaksa banyak perusahaan dan industri harus merumahkan karyawannya. Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan kenaikan angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dari 8,56% di 2019 menjadi 8,99 di 2020 dan kemudian melandai di titik 8,53% pada 2021. Melonjaknya angka kemiskinan di Sul-Sel selama pandemic COVID 19 seiring dengan kenaikan angka pengangguran di Sul-Sel. BPS (2022) melaporkan 4,62 % pengangguran di tahun 2019 kemudian menjadi meningkat pada titik 6,31 % di tahun 2020 selanjutnya menurun pada angka 5,72% di tahun 2021. Fenomena ini tentu berdampak pada semakin maraknya pengemis dan gelandangan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan.

Meskipun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki kebijakan dalam merespon permasalahan gelandangan dan pengemis serta anak jalanan melalui Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, namun kebijakan ini sifatnya general dan belum memberikan kerangka program praktis dalam melakukan tindakan pencegahan dan respon penanggulangannya. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga menetapkan Perda No 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar. Kebijakan ini mengatur program pendataan dan pembinaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Namun kebijakan ini belum berjalan dengan maksimal serta perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dengan perkembangan sosial saat ini.

Kehadiran anak jalanan, pengemis dan gelandangan dirasakan semakin mencemaskan, karena disatu sisi dapat menimbulkan dampak negatif bagi penertiban, kebersihan dan keamanan, serta keindahan kota. Di sisi lain, keberadaan mereka juga dapat memicu kriminalitas dan dampak negatif sosial lain. Melihat berbagai kondisi yang dialami anak jalanan, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan langkah-langkah kebijakan strategis dan kordinatif dalam menangani masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang lintas wilayah antar kabupaten/kota.

### **c. Rekomendasi**

Studi ini merekomendasikan pembuatan peraturan daerah yang spesifik mengenai penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis baik pada level provinsi maupun pada level kabupaten/kota, khususnya di wilayah Mamminasata. Meskipun Pemerintah Kota Makassar telah. Memiliki kebijakan terkait isu ini, namun kami menyarankan untuk melakukan revisi dengan mengikuti perkembangan permasalahan serta dengan menambahkan beberapa komponen tertentu terkait dengan upaya penanganan yang lebih komprehensif. Kebijakan pemerintah atau Peraturan Daerah yang akan dibuat diharapkan memperhatikan empat komponen berikut :

1. Program Penguatan Koordinasi Antarlembaga
2. Program Individu Maju Mandiri
3. Program Penguatan Keberfungsian Keluarga
4. Kampanye Publik Penyadaran dan Pelibatan Masyarakat

## **III. Studi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Punagaan Berbasis Wisata di Kabupaten Selayar**

### **a. Abstrak**

Tim Peneliti, 2022 “Studi Potensi Pengembangan Wisata Bahari Pantai Punagaan Kabupaten Kepulauan Selayar Menjadi Bagian Usulan KEK Sulawesi Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan daya tarik kawasan wisata pantai Punagaan, memberikan arahan pengembangan pantai punagaan agar menjadi pedoman serta arahan dasar dalam melakukan pengembangan KEK Punagaan sebagai Kawasan Wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta memberikan arahan kawasan yang menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui sektor ekonomi khusus pariwisata bahari. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan secara evaluatif, ekstrapolatif, dan hubungan fungsional antar kegiatan. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga lahirlah suatu konsep dan sebagai dasar dalam analisis selanjutnya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pantai Punagaan cukup potensial untuk dikembangkan dan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini didukung dengan potensi dan daya tarik Pantai Punagaan yang cukup beragam serta pelibatan masyarakat sebagai subyek atau pelaku dalam program konservasi sehingga daya beli masyarakat meningkat.

## **b. Latar Belakang**

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus di bidang Pariwisata. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 123 gugusan pulau-pulau sangat menunjang kegiatan pariwisata khususnya pariwisata bahari. Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki luas laut 9.144,66 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 670 km<sup>2</sup> yang menjadi kekuatan bagi pengembangan pariwisata khususnya wisata pantai di daerah ini. Salah satu pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar yang potensial untuk dikembangkan dan diusulkan menjadi bagian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah Pantai Punagaan.

Pantai Punagaan adalah pantai dengan potensi yang beragam mulai dari keindahan laut, beragamnya ekosistem bawah laut, panorama alam dengan relief pegunungan yang indah serta ditunjang dengan hunian bagi kalangan wisatawan yang eksotis. Pantai Punagaan sangat diminati masyarakat dalam kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang, dan kegiatan wisata lainnya, sehingga tidak salah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Pantai Punagaan sebagai salah satu simpul pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan andalan pada wisata bahari.

Pantai Punagaan dengan luas pengembangan hingga 7.5 ha dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dalam RTRW Kabupaten Selayar Tahun 2012-2032, kawasan pantai punagaan merupakan daerah sempadan pantai dan tidak mengganggu kawasan lindung yang ada. Hal-hal ini dapat menjadi pertimbangan, Pantai Punagaan diusulkan menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Sulawesi Selatan karena telah memenuhi kriteria yang ada.

## **c. Rekomendasi**

Diusulkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi term of reference untuk melaksanakan pengembangan wisata bahari, berikut rekomendasinya:

- 1) Menyusun instrument kebijakan khusus yang mengatur secara detail tentang pengelolaan destinasi wisata. Kebijakan pengelolaan tidak digeneralisasi untuk semua destinasi mengingat setiap destinasi membutuhkan pendekatan yang unik (terdapat nilai-nilai kearifan lokal). Didalam kebijakan itu juga diatur skema sinergi antar organisasi pelaksana secara lebih rapi agar tidak menimbulkan fragmentasi dikalangan birokrasi yang menjadi organisasi pelaksana.
- 2) Menyusun kebijakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata, baik dari sisi organisasi pelaksana maupun kelompok masyarakat yang menjadi penunjang pariwisata.
- 3) Mengembangkan kebijakan politik anggaran yang berpihak pada pengembangan destinasi wisata, serta memudahkan birokrasi para pemodal untuk menanamkan devisanya di sektor pariwisata.
- 4) Membentuk badan yang dapat mempromosikan dan mengelola pariwisata pantai Punagaan.

## **IV. Studi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bahuluang Berbasis Wisata di Kabupaten Selayar**

### **I. Abstrak**

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah pulau sebanyak 295 pulau. Dari ratusan pulau yang berada di Sulawesi Selatan ini memiliki potensi dan sumber daya dengan spesifikasi tersendiri. Pulau Bahuluang di Kepulauan Selayar diantaranya memiliki sumber daya langka yang belum diberdayakan optimal sebagai sumber penggerak roda ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Kondisi alamnya sangat menarik dan berpotensi dikembangkan menjadi kawasan wisata berkelas dunia. Bagaimana perspektif akademik tentang potensi pulau ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan bagaimana konsep pembangunan dan yang tepat untuknya adalah permasalahan penelitian. Tujuannya adalah mengungkapkan potensi dan strategi pengembangan kawasan serta model pengembangannya menjadi kawasan wisata berbasis potensi bahari berkelas dunia. Metode yang digunakan adalah logical argumentation dianalisis menggunakan metode SWOT. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pulau Bahuluang tidak hanya dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata bahari tetapi juga dapat memenuhi semua selera wisata dari bawah laut hingga puncak bukit. Strategi pembangunannya dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian utama sebagai pemilik modal dibantu oleh badan otoritas pengelola dan pengendali kawasan dibantu oleh pihak ketiga dari investor dan dilengkapi oleh lembaga penunjang dalam perlindungan Pemerintah Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini berupa terdapatnya beberapa pengembangan potensi daya tarik wisata yang kedepannya dapat menjadi andalan di Pulau Bahuluang, mulai dari wisata bawah laut hingga wisata bukit. Sehingga akan menghasilkan beberapa arahan beserta strategi yang dapat menjadi daya tarik wisata di Pulau Bahuluang. Berkah ini memungkinkan dikembangkan menjadi sumber daya yang lebih berkualitas untuk kesejahteraan rakyatnya. Potensi keindahan alam dalam kelangkaannya dapat menjadi daya tarik penduduk dunia menikmati dan mengembangkan ilmu pengetahuan

### **b. Latar Belakang**

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang memiliki batas wilayah tertentu dan berada di wilayah hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh negara. Kawasan ini dipersiapkan untuk menjalankan roda perekonomian dengan mendapatkan keistimewaan dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Istilah Kawasan Ekonomi Khusus belum lama ini banyak mendapat perhatian. Pasar ekonomi global yang menuntut persaingan antar negara dalam dan dari semua aspek termasuk aspek ekonomi membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di persiapkan bagi Indonesia menghadapi pasar tunggal. Pengembangan yang dilakukan sejak dibuatnya PP No. 33 tahun 1996 tentang kawasan bebas tertentu dari tahun ke tahun terus mendapatkan alternatif baru yang dapat mengantarkan Indonesia sebagai negara yang kuat dalam ekonomi. Kegiatan ekspor meningkatkan iklim investasi yang tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan

kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berdaya saing dan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayahnya, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), serta masyarakat terutama masyarakat yang ada di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut berada. Dukungan itu harus terencana, terintegrasi, dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Dengan adanya Kawasan Khusus Ekonomi Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar, tentunya akan berdampak pula pada Provinsi Sulawesi Selatan, seperti penambahan investasi, pendapatan, nilai tambah bruto, tenaga kerja dan pajak. Kemudian pembangunan ekonomi yang nantinya tidak hanya bertumpu pada kontribusi satu sektor, melainkan juga ada keterkaitan antar sektor lainnya. Serta diharapkan pula kontribusi ekonomi Sulawesi Selatan terhadap nasional akan semakin besar, yang dimana Provinsi Sulawesi Selatan berada di peringkat 9 nasional pada tahun 2021.

Harapan dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Bahuluang Berbasis Wisata Bahari Kabupaten Kepulauan Selayar akan mentransformasikan struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar terutama struktur ekonomi Bontosikuyu dan daerah-daerah penyangganya untuk memiliki nilai tambah yang lebih besar yang berbasis pada kawasan wisata bahari. Disamping itu dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Bahuluang sebagai Kawasan Destinasi Wisata diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.

### **c. Rekomendasi**

Mengacu pada tinjauan lapangan dan hasil analisa yang dilakukan, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan sebagai berikut:

- Membuat kebijakan pengelolaan pariwisata serta pembuatan konsep zona kelangkaan berdasarkan kualitas kelangkaan objek wisata
- Menyusun kebijakan program pemberdayaan/perlibatan masyarakat dan sumber daya manusia di Pulau Bahuluang sebagai pelaku usaha pariwisata.
- Pembentukan Badan Usaha sebagai pengelola kawasan wisata.

## **V. Kajian tentang Pengembangan Ekowisata di Daerah Pesisir di Kepulauan Sulawesi Selatan**

### **I. Abstrak**

Pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan merupakan kebijakan penting Departemen Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa wilayah pesisir dan laut secara ekologis dan ekonomis potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indeks kesesuaian dan indeks analisis dukung kawasan ekowisata hutan mangrove Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di tiga kabupaten yakni Kabupaten Sinjai, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Maros yang dimulai sejak April sampai September 2022 (selama enam bulan).

Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan mix metod. Analisis yang digunakan dengan Teknik penggambaran pada 4 aspek yakni Analisis Indeks Kesesuaian wisata, Evaluasi Kelayakan Ekowisata Potensi ekowisata yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Jeneponto, Sinjai dan Maros secara umum dapat dikembangkan sebagai ekowisata. Walaupun terdapat objek wisata, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan aspek ekowisata sehingga sesuai dengan syarat dari ekowisata.

## **b. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau sekitar 17.508 dengan garis pantai yang panjangnya kurang lebih sekitar 81.000 km, memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar (Bengen:2011, dalam Umam,2013:1). Dua pertiga luas wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan (Dahuri et al., 2004)

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi alam yang terbentang Luas dari sabang sampai maraoke, yang di dukung sumber daya alam yang beraneka ragam yang berpotensi untuk diolah dan dimanfaatkan, selain itu Indonesia juga kaya akan seni budaya daerah, peninggalan sejarah terdahulu dan yang tidak kalah menarik adalah keindahan panorama alamnya yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan baik. Ternyata pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional (Sefira Ryalita Primadany, dkk, : 136.)

Begitupun dengan wilayah perairan Indonesia memiliki sumber daya hayati yang beragam, khususnya di pesisir. Pesisir merupakan daerah peralihan antara darat dan laut. Ekowisata di wilayah pesisir antara lain : terumbu karang, mangrove, lamun, estuaria, serta daerah pantai. Ekowisata pesisir yang termasuk perairan dangkal merupakan Ekowisata yang produktivitasnya tinggi dan paling banyak dikunjungi manusia. Pesisir dan laut Indonesia mempunyai sumber daya alam yang bernilai estetika tertinggi. Hal ini ditunjukkan melalui pengakuan dunia internasional yang memasukkan Indonesia sebagai salah satu destinasi terbaik untuk ekowisata bahari.

Damanik dan Weber (2006) menyatakan bahwa, ide dasar pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian sumberdaya alam dan budaya. Ide kemudian diturunkan ke dalam konsep pariwisata berkelanjutan. Artinya adalah pembangunan sumberdaya (atraksi, aksesibilitas, amenitas) pariwisata yang bertujuan untuk memberikan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan dan nilai kepuasan optimal bagi wisatawan dalam jangka panjang

Pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan merupakan kebijakan penting Departemen Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa wilayah pesisir dan laut secara ekologis dan ekonomis potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong.

Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia dengan lebih dari 4500 spesies ikan, lebih dari 70 genus hewan karang, 18% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dunia, 13 spesies lamun dari 16 spesies di dunia, dan spesies rumput laut terbanyak di dunia. Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km

(Bengen, 2001) Luas wilayah perairan Indonesia sebesar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3,1 juta km<sup>2</sup> Perairan Nusantara dan 2,7 km<sup>2</sup> Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau 70 persen dari luas total Indonesia (S., 2001)

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan, pola pemanfaatan yang sifatnya merusak dan mengancam kelestarian sumberdaya pesisir dan laut masih saja terus berlangsung. Hal ini disebabkan oleh desakan kebutuhan hidup, yang semakin lama semakin tinggi. Pengembangan ekonomi wisata (ekowisata) merupakan salah satu alternatif pembangunan yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut (Tuwo:2011, dalam Umam 2013:1)

Ekowisata adalah alternatif yang dapat dipilih dan dikembangkan mengingat potensi sumber daya yang tersedia. Dasar pemikiran utama dari pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekowisata ini adalah Pengembangan wisata hutan mangrove dengan tetap memberikan manfaat secara sosial ekonomi kepada masyarakat. Pengembangan ekowisata adalah untuk kepentingan ekologi dengan tetap membantu kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu lingkungan baik alam yang alami maupun buatan serta budaya yang ada yang bersifat informatif dan partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial-budaya. Dalam pengelolaan ekowisata perlu direncanakan secara matang dengan memperhatikan segala aspek yang saling mempengaruhi agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat buruk pada objek tersebut (Subadra 2008)

Pada saat ini kegiatan ekowisata berkembang sebagai respon masyarakat akan kejenuhan objek wisata buatan atau konvensional. Masyarakat lebih cermat untuk memilih bepergian atau berkunjung ke ekowisata dibandingkan wisata konvensional karena sifatnya yang tidak merusak alam dan tetap mempertahankan potensi yang ada di tempat tersebut. Kecenderungan masyarakat yang lebih memilih bepergian ke ekowisata dibandingkan wisata buatan menjadi daya tarik tersendiri dan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekowisata di daerah yang memiliki keanekaragaman ekologi. Salah satu potensi alam yang dapat dijadikan ekowisata yaitu Ekowisata mangrove.

Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat baik secara fisik, biologi dan ekonomi. Secara fisik fungsi, manfaat dan layanan Ekowisata hutan mangrove meliputi perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut, perangkap sedimen dan recycling nutrient. Secara biologi, hutan mangrove memberikan layanan terhadap kestabilan Ekowisata, sumber nutrient, dan sebagai area memijah, mencari makan dan berkembang biak bagi biota laut (seperti ikan, kepiting dan udang). Secara ekonomi hutan mangrove memberikan layanan sebagai area pengembangan budidaya, perikanan, rekreasi ekowisata, penghasil kayu dan daun nipah yang dapat menunjang kehidupan ekonomi masyarakat. Mangrove dapat menghasilkan bahan-bahan material untuk rumah tangga dan industri seperti kayu bakar, arang, dan kertas yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Malik Abdul, 2019:71-72)

Kebutuhan ekowisata mangrove di Sulawesi Selatan masih perlu dikembangkan, mengingat masih banyak hutan mangrove yang belum dikembangkan dan disatu sisi masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang ekowisata mangrove. Beberapa ekowisata mangrove yang pernah

dikunjungi, yaitu ekowisata mangrove Lantebung dan Bawalipu sudah ramai didatangi wisatawan lokal, terutama ketika hari libur. Dari 2 sampel ekowisata mangrove tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat antusias menikmati ekowisata mangrove.

Letak geografis Sulawesi Selatan boleh dikatakan merupakan sebuah pulau yang berbatasan langsung dengan beberapa pantai. Namun, akses yang mudah dijangkau bukan merupakan satu-satunya faktor yang menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pilihan lokasi wisata. Jenis wisata yang ditawarkan maupun kondisi alam dan lingkungan obyek wisata juga mempengaruhi keinginan wisatawan untuk mengunjungi berbagai obyek wisata di Sulawesi Selatan.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kedatangan wisatawan pada suatu obyek wisata, yang pertama adalah faktor irrasional (dorongan bawah sadar) yang meliputi lingkup pergaulan dan ikatan keluarga, tingkah laku seseorang, pengaguman pribadi, perasaan-perasaan keagamaan, hubungan masyarakat dan promosi pariwisata, iklan dan penyebaran serta kondisi ekonomi (pendapatan dan biaya). Sedangkan faktor yang kedua merupakan faktor rasional, meliputi sumber-sumber wisata, fasilitas wisata, kondisi lingkungan, susunan kependudukan, situasi politik dan keadaan geografis (Wahab 1992)

Menurut beberapa pengamat pariwisata mengatakan bahwa perkembangan dunia pariwisata saat ini mulai banyak yang meninggalkan konsep pariwisata konvensional (profit orientet), meskipun tidak murni seratus persen dan konsep pariwisata saat ini banyak yang mengarah pada lingkungan (ekowisata), dimana keaslian potensi kekayaan alam dan peran serta masyarakat setempat sangat dibutuhkan. Indonesia yang merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah ruah, bahkan perannya yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan terutama wisata alam. Salah satu obyek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut saat ini adalah kawasan Ekowisata Mangrove Sulawesi Selatan. Kawasan konservasi hutan mangrove yang terletak di Sulawesi Selatan. Ekowisata mangrove merupakan salah satu tempat wisata yang sudah menjadi ikon warga Surabaya di mata pelancong wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Di kawasan ini terdapat sedikitnya 30 spesies satwa dilindungi. Selain itu, kondisi alam yang tenang dan asri dengan pemandangan hutan mangrove yang menyegarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang berkunjung. Kondisi tersebut ditunjang dengan fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola antara lain seperti lahan parkir, loket pembayaran, dermaga, warung, toilet umum, musholla, gazebo dan lain-lain. Keterbatasan tempat rekreasi yang berbasis lingkungan (ekowisata) yang ada di Sulawesi Selatan merupakan salah satu alasan mengapa pemerintah membangun Ekowisata Mangrove kabupaten Sinjai, Jeneponto dan Maros yang di kelola oleh masyarakat sendiri. Dengan seiring berjalannya waktu tempat wisata ini mampu menyedot perhatian masyarakat Sulawesi Selatan yang ingin berwisata yang berbasis lingkungan sehingga tiap tahunnya jumlah pengunjung semakin meningkat.

Ekowisata merupakan salah satu upaya pemerintah menghadirkan konsep wisata tanpa mengabaikan lingkungan. Dimana ekowisata ini juga merupakan arah pengembangan permukiman nelayan di daerah

pesisir/kepulauan Sulawesi Selatan aspek keruangan, aspek lingkungan, nilai sosial-budaya dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat terintegrasi dengan baik maka, dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi kelautan sekaligus melibatkan masyarakat dalam pengembangan ekowisata di daerah pesisir/kepulauan Sulawesi Selatan.

Pengikutsertaan masyarakat dalam ekowisata akan memberikan dampak positif. Dari segi lingkungan dan ekonomi, jika masyarakat lokal tidak dilibatkan, sumberdaya dipastikan akan rusak dan nilai jual kawasan beserta investasinya akan hilang (Fandeli, 2001). Oleh karena itu, untuk dapat mengoptimalkan sumberdaya mangrove dan lingkungan pesisir perlu dilakukan pengkajian untuk mengetahui potensi, permasalahan, strategi pengembangan dan diperlukan pengetahuan tentang nilai strategis dari keberadaan hutan mangrove yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar salah satunya melalui kegiatan pengembangan ekowisata dengan upaya konservasi, proses pemberdayaan masyarakat dan kegiatan rekreasi yang dilakukan secara terpadu

Pengelolaan Ekowisata mangrove merupakan tanggung jawab seluruh elemen baik itu dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Ekowisata mangrove adalah melakukan sosialisasi mengenai pengembangan obyek wisata hutan mangrove dan mengevaluasi kelayakan ekowisata di kabupaten Jeneponto, kabupaten Maros dan Kabupaten Sinjai

### **c. Rekomendasi**

#### ***REKOMENDASI UNTUK PEMPROV. SULAWESI SELATAN***

1. Direkomendasikan kepada pihak Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulsel untuk mengadakan sumber air bersih seperti PDAM dan sumur bor disekitaran wilayah wisata khususnya di wisata Bonto Bahari Kabupaten Maros, wisata Tongke tongke Kabupaten Sinjai dan wisata mangrove Tarowang Kabupaten Jeneponto.
2. Direkomendasikan kepada Dinas Kebudayaan dan Keparawisataan agar dapat mengembangkan wisata mangrove Kabupaten Jeneponto, Sinjai dan Maros, agar menjadi pemasukan PAD Pemprov dan pemda serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Direkomendasikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan agar kiranya melakukan pemeliharaan dan perawatan serta maksimalisasi pemanfaatan terhadap TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berlokasi Dermaga Bonto Bahari Kabupaten Maros agar dapat menambah ketertarikan wisata dan menambah sarana penunjang wisata Mangrove di desa Pajjukukang Kabupaten Maros
4. Direkomendasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulawesi Selatan agar kiranya memberikan sarana dan prasarana kebersihan di semua titik tempat wisata khususnya di wisata Dermaga Bonto Bahari Kota Maros dan wisata tongke tongke Kab. Sinjai
5. Direkomenadikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan agak kiranya memberikan jalur tranportasi khusus kepada tempat-tempat wisata di Sulawesi Selatan.

6. Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan agar kiranya memberikan pembinaan di setiap desa dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya wisata di desa wisata yang memiliki potensi wisata berkategori tinggi
7. Direkomendasikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan agar memberikann penyuluhan kepada masyarakat agar tidak mengotori ruang ruang wisata khususnya di wisata tongke tongke kab. Sinjai

#### ***REKOMENDASI UNTUK PEMDA KAB. SINJAI, JENEPONTO dan MAROS***

1. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah kabupaten Sinjai agar kiranya memberikan perhatian kepada sarana dan prasarana penunjang pengembangan ekowisata tongke tongke seperti perbaikan jalan.
2. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah kabupaten Sinjai agar kiranya memaksimalkan pengelolaan Wisata Tongke-tongke khususnya pintu masuk hutan Mangrove
3. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah kabupaten Sinjai, Jeneponto Dan Maros agar kiranya memberikan layanan Kesehatan dan keamanan disekitar ekowisata.
4. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah kabupaten Sinjai, Jeneponto Dan Maros agar kiranya menempatkan container sampah disekitaran ekowisata
5. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah kabupaten Sinjai, Jeneponto Dan Maros agar memberikan layanan air Bersih disekitaran ekowisata.

## **VI. Kajian Reformasi Kebijakan "New Normal Tourism" dalam Peningkatan Ekonomi Sektor Pariwisata di Sulawesi Selatan**

### **a. Abstrak**

Berdasarkan data dari World Travel & Tourism Council pada tahun 2018, Indonesia menduduki posisi ke-9 dari 10 negara dengan pariwisata terbaik di seluruh dunia. Bank Indonesia pun turut mengakui bahwa sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar kedua. Namun demikian, munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan pembatasan mobilitas yang membawa dampak yang masif. Dilansir dari Kemenparekraf, kedatangan turis global mengalami penurunan drastis hingga 78% atau 1.139 juta selama pandemi. Industri di sektor pariwisata yang sebelumnya menjadi penyumbang terbesar kedua bagi devisa negara harus terpukul dan mengalami penurunan pendapatan hingga 87,8% (BPS, 2020). Sejalan dengan Visi Pemerintah Sulawesi Selatan dimana sektor pariwisata menjadi program unggulan maka penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka mendukung kelangsungan dan peningkatan ekonomi sektor pariwisata di Sulsel. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menjelaskan upaya dan strategi yang dilakukan oleh para pelaku pariwisata di Sulsel sebelum pandemi dan di masa new normal; 2) Menganalisis dan mengevaluasi Sejauhmana kebijakan Pemerintah Daerah Sulsel dalam mendukung kelangsungan sektor Pariwisata sebelum pandemi dan di masa new normal; 3) Merumuskan

strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian sektor pariwisata di Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan mix method yakni kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan survey pertanyaan terbuka yang ditujukan untuk informan dengan kategori pelaku usaha, pemerintah dan wisatawan. Metode penentuan sampel menggunakan purposive random sampling. Kegiatan penelitian dilakukan di tiga daerah dengan sektor pariwisata prioritas/unggulan, yakni Kabupaten Tana Toraja, Bulukumba, dan Gowa, Malino. Output penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan kebijakan berupa hasil studi dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada (existing), dan rekomendasi (policy paper) bagi perumusan kebijakan selanjutnya.

## **b. Latar Belakang**

Berdasarkan data dari World Travel & Tourism Council pada tahun 2018, Indonesia menduduki posisi ke-9 dari 10 negara dengan pariwisata terbaik di seluruh dunia. Bank Indonesia pun turut mengakui bahwa sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar kedua. Namun demikian, munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan pembatasan mobilitas yang membawa dampak yang masif. Dilansir dari Kemenparekraf, kedatangan turis global mengalami penurunan drastis hingga 78% atau 1.139 juta selama pandemi. Industri di sektor pariwisata yang sebelumnya menjadi penyumbang terbesar kedua bagi devisa negara harus terpukul dan mengalami penurunan pendapatan hingga 87,8% (BPS, 2020).

Sejalan dengan Visi Pemerintah Sulawesi Selatan dimana sektor pariwisata menjadi program unggulan maka penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka mendukung kelangsungan dan peningkatan ekonomi sektor pariwisata di Sulsel.

## **c. Rekomendasi**

Kebijakan yang dibutuhkan oleh pemerintah baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Gowa, dan Kabuapten Maros memiliki kesamaan sehingga pada bagian rekomendasi disajikan secara umum:

1. Reformulasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijalankan oleh Bagian Hukum dan Dinas Provinsi dengan menambahkan beberapa pasal yang mengatur: (a) Merumuskan kewajiban yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan digitalisasi penyelenggaraan pariwisata sebagai pusat data; (b) Merumuskan ketentuan terkait pembentukan badan promosi pariwisata daerah; (c) Merumuskan ketentuan terkait fasilitasi pengembangan sumber daya manusia untuk pengelolaan objek wisata; fasilitasi pengembangan sumber daya manusia untuk pelaku usaha kuliner khas daerah; (d) Merumuskan ketentuan terkait standarisasi pembangunan sarana prasarana pariwisata sesuai khas daerah kabupaten; (e) Merumuskan ketentuan terkait pengaturan tata cara pembinaan; dan (f) Merumuskan ketentuan terkait peran pemerintah daerah untuk memfasilitasi kemitraan (penta-helix).

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros yang jalankan oleh masing-masing Bagian Hukum dan Dinas Budaya dan Pariwisata terhadap daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata dilakukan revisi, sedangkan daerah yang saat ini dalam proses pembentukan perda riparkab dilakukan penyesuaian dengan revisi memuat hal-hal berkaitan dengan:
  1. Merumuskan ketentuan terkait digitalisasi penyelenggaraan pariwisata sebagai pusat data;
  2. Merumuskan ketentuan terkait pembentukan badan promosi pariwisata daerah;
  3. Merumuskan ketentuan terkait fasilitasi pengembangan sumber daya manusia untuk pengelolaan objek wisata; fasilitasi pengembangan sumber daya manusia untuk pelaku usaha kuliner khas daerah;
  4. Merumuskan ketentuan terkait standarisasi pembangunan sarana-prasarana pariwisata sesuai khas daerah kabupaten;
  5. Merumuskan ketentuan terkait pengaturan tata cara pembinaan; dan
  6. Merumuskan ketentuan terkait peran pemerintah daerah untuk memfasilitasi kemitraan (penta-helix).
3. Pengembangan Sumber Manusia untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha pengelola objek wisata dengan membentuk kader pendamping oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten.
4. Pengembangan Sumber Manusia untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha kuliner khas daerah dengan membentuk kader pendamping oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten
5. Pembentukan Kader Pendamping Digitalisasi bagi Pelaku Usaha oleh Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten
6. Program Fasilitas dengan Mitra oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan Perguruan Tinggi Merumuskan Strategi Pengembangan dan Pemasaran Produk Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.
7. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan upaya standarisasi produk daerah pelaku usaha ekonomi kreatif, teknologi produksi (untuk makanan memenuhi standar kesehatan atau keamanan konsumsi dan ramah lingkungan).
8. Pemerintah Kabupaten Maros dan Gowa perlu melakukan fasilitasi pengembangan pariwisata dengan melakukan pengaturan berdasarkan permintaan dan penawaran pariwisata: (1) menambah destinasi wisata baru; (2) memperkuat tujuan baru yang dilakukan dengan cara membuat dan menambah daya atraksi yang telah ada; (3) pengembangan baru secara keseluruhan agar memperoleh jangkauan luas; (4) pengembangan baru pada objek wisata dengan cara meningkatkan fasilitas dan meminimalisir pengeluaran wisatawan; serta (5) menciptakan kegiatan baru.
9. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten berkolaborasi dengan melibatkan pihak komunitas yang konsen terhadap pariwisata untuk melakukan pelatihan penguatan destination management organization (DMO) terutama terhadap pengelolaan desa wisata, disertai dengan pendampingan dan evaluasi berkala untuk tahap awal hingga terbentuk kemampuan destination management organization (DMO).

10. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota berkolaborasi mendorong dan memfasilitasi branding dan promosi untuk penjualan produk MICE baik berskala lokal, nasional, dan internasional, Penyelenggaraan suatu acara bisnis MICE akan memberikan efek berlipat ganda (multiplier effect) yang lebih luas dan lebih besar terhadap sektor-sektor pendukung pariwisata yang lain dengan memperhatikan kerangka pemasaran, program promosi untuk bisnis MICE agar tidak dilakukan secara parsial. Promosi restoran, transportasi, obyek dan atraksi wisata yang terkait dengan bisnis MICE wajib tidak diikutsertakan menjadi satu informasi. Program pemasaran terpadu yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan wisata konvensi dapat menyediakan informasi dan menyajikannya dalam bentuk promosi yang utuh. Secara khusus Kabupaten Toraja Utara dan Bulukumba memiliki berbagai keunggulan, baik dilihat dari fasilitas perhotelan, gedung pertemuan, sarana dan prasarana transportasi, jaringan telekomunikasi dan ketersediaan berbagai jenis wisata termasuk kuliner dan kerajinan.

## **VII. Kajian Rantai Nilai Agrowisata berbasis Pedesaan di TWA Malino Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan**

### **a. Abstrak**

Taman Wisata Alam (TWA) merupakan konsep pengelolaan kawasan konservasi yang tidak hanya sebagai tempat pelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat sumber daya yang ada di dalamnya, seperti manfaat rekreasi, pendidikan, penelitian dan pelestarian budaya. Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pengertian Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang utamanya dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan penyangga TWA Malino merupakan kawasan yang sangat ideal untuk pengembangan destinasi wisata yang bertema agrowisata, mengingat daerah-daerah yang tercakup di dalam kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu sentra produksi pertanian hortikultura dan tanaman hias di Sulawesi Selatan. Guna merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan agrowisata di daerah penyangga kawasan TWA Malino, maka kajian rantai nilai agrowisata di daerah penyangga kawasan TWA Malino diperlukan. Kajian rantai nilai agrowisata ini dimaksudkan selain untuk mengoptimalkan nilai produk-produk agrowisata, juga dimaksudkan untuk memetakan aliran finansial bagi setiap aktor yang terkait dalam pengembangan agrowisata, termasuk nilai agrowisata yang dapat dikontribusikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

### **b. Latar Belakang**

Taman Wisata Alam (TWA) merupakan konsep pengelolaan kawasan konservasi yang tidak hanya sebagai tempat pelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat sumber daya yang ada di dalamnya, seperti manfaat rekreasi, pendidikan, penelitian dan pelestarian budaya. Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pengertian Taman

Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang utamanya dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Sulawesi Selatan memiliki 8 (delapan) lokasi TWA dengan daya tarik khas masing-masing. Tiga diantaranya merupakan TWA dengan daya tarik ekosistem danau dimana ketiganya terletak di Kabupaten Luwu Timur. TWA Sidrap memiliki daya tarik goa dan air belerang, TWA Lejja di Soppeng terkenal sebagai tempat pemandian air panas, TWA Cani Sirenreng merupakan ekosistem hutan hujan tropis, memiliki air terjun tiga .di Kota palopo merupakan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan bawah, dengan daya tarik panorama alam yang indah dengan aneka ragam flora dan fauna. Selanjutnya TWA Malino dengan sejumlah objek wisata yang menarik seperti hutan pinus, air terjun dan lainnya.

Kawasan TWA Malino dan daerah penyangganya sudah sejak lama dikenal sebagai lokasi rekreasi dan destinasi wisata yang menarik karena memiliki udara yang sejuk dan panorama alam yang indah serta berbagai objek wisata alam lainnya. Daerah ini awalnya merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang diubah statusnya menjadi kawasan konservasi yang disebut Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Malino. Secara administratif kawasan TWA Malino mencakup 4 (empat kelurahan) masing-masing Kelurahan Malino, Kelurahan Gantarang, Kelurahan Pattapang dan Kelurahan Bulutana di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Kawasan ini setiap tahun ramai dikunjungi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Data kunjungan wisata nusantara dari tahun ke tahun meningkat, dan pada tahun 2019 berjumlah 287.687 orang.

Para wisatawan yang berkunjung ke daerah ini umumnya berwisata untuk menikmati objek-objek wisata alam, seperti panorama alam yang indah, air terjun, hutan pinus, Bunker peninggalan Jepang dan wisata alam lainnya. Daerah-daerah di sekitar kawasan TWA Malino yang merupakan kawasan penyangga juga menyimpan potensi wisata yang menarik, termasuk potensi agrowisata seperti kebun teh, kebun stroberi, taman anggrek dan lain sebagainya.

Kawasan penyangga TWA Malino merupakan kawasan yang sangat ideal untuk pengembangan destinasi wisata yang bertema agrowisata, mengingat daerah-daerah yang tercakup di dalam kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu sentra produksi pertanian hortikultura dan tanaman hias di Sulawesi Selatan. komoditi pertanian khas dan sudah melegenda di kawasan ini antara lain Markisa, Perkebunan Teh, tanaman anggrek dan lainnya. Hanya saja objek-objek tersebut sebagian besar masih berkonsentrasi dalam kegiatan produksi komoditi dan belum terkelola sebagai destinasi agrowisata yang berdaya saing. Selain itu tata kelola agrowisata yang belum optimal, minimnya infrastruktur serta belum terkoneksi dengan jaringan wisata yang ada, menyebabkan daya saing agrowisata di kawasan ini belum optimal.

Pengembangan Agrowisata di daerah penyangga kawasan TWA Malino memiliki nilai strategis baik dalam pengembangan sektor kepariwisataan daerah secara umum, maupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan PAD dan perekonomian daerah. Selain berkontribusi dalam keragaman objek dan atraksi wisata yang dapat bersinergi dengan objek wisata lainnya di kawasan TWA Malino, agrowisata di daerah penyangga TWA Malino juga dapat meningkatkan dan menciptakan nilai-nilai baru pertanian, serta

mendorong berkembangnya jasa-jasa penunjang agrowisata seperti jasa transportasi, akomodasi, café, restoran, pemandu wisata, souvenir produk, penyewaan alat-alat operasi pertanian dan lain-lain. Dengan rantai nilai yang panjang, pengembangan agrowisata berpotensi menjadi engine of growth yang dapat memberi dampak ekonomi secara luas kepada masyarakat termasuk dalam meningkatkan PAD daerah. Dengan demikian pengembangan agrowisata di daerah penyangga TWA Malino tidak hanya mendukung pelestarian sumberdaya di dalam TWA, tetapi juga mendukung terwujudnya misi pembangunan provinsi Sulawesi Selatan, khususnya misi 3 yakni terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif

Guna merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan agrowisata di daerah penyangga kawasan TWA Malino, maka kajian rantai nilai agrowisata di daerah penyangga kawasan TWA Malino diperlukan. Kajian rantai nilai agrowisata ini dimaksudkan selain untuk mengoptimalkan nilai produk-produk agrowisata, juga dimaksudkan untuk memetakan aliran finansial bagi setiap aktor yang terkait dalam pengembangan agrowisata, termasuk nilai agrowisata yang dapat dikontribusikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pendekatan rantai nilai dalam kajian pengembangan agrowisata telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus kajian yang beragam. Morales-Zamorano (2020) menggunakan pendekatan rantai nilai menganalisis hubungan nilai di sepanjang rantai layanan agrowisata, yang memungkinkan peningkatan daya tarik pariwisata pada perusahaan pertanian di koridor pertanian San Quintín Valley, Baja California Meksiko. Selanjutnya, Broccardo, L. et al (2017) juga menggunakan pendekatan rantai nilai untuk menganalisis faktor kunci keberhasilan model bisnis agrowisata di Italia. Lebih lanjut, Rike Penta Sitio (2017) melakukan kajian pemetaan rantai nilai agrowisata Gunung Mas, serta menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan agrowisata Gunung Mas di Kota Bandung, Jawa Barat.

Berdasar pada kajian sebelumnya, maka untuk mengisi kesenjangan pengetahuan, kajian tentang rantai nilai agrowisata di daerah penyangga kawasan TWA Malino berfokus pada pemetaan dan analisa terhadap aktivitas utama dan pendukung di sepanjang rantai nilai agrowisata di lokasi penelitian. Peluang nilai-nilai pengetahuan, kesehatan, budaya dan nilai lingkungan pada setiap rantai layanan agrowisata untuk mendukung optimalisasi nilai dan daya saing agrowisata, memetakan aliran nilai ke setiap stakeholder agrowisata yang terkait, termasuk aliran nilai yang dapat berkontribusi terhadap PAD Daerah. Selain itu, kajian ini juga menganalisa kebijakan dan skenario pengembangan agrowisata yang berdaya saing, berkelanjutan dan pro terhadap kelompok marginal.

### **c. Rekomendasi**

- 1) Pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya system informasi yang terintegrasi baik system informasi virtual (digital) maupun system informasi fisik berupa papan informasi yang berisi peta objek agrowisata
- 2) Pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana penunjang agrowisata, seperti jalan menuju destinasi agrowisata, layanan akomodasi, kuliner, dan pusat belanja souvenir dan oleh-oleh.

- 3) Pemerintah perlu menggiatkan pelatihan SDM yang berperan penting dalam menjalankan operasional agrowisata sehingga pengunjung mendapatkan kesan yang baik sehingga ingin berkunjung kembali dan mempromosikan agrowisata.
- 4) Memfasilitasi pengembangan suatu objek agrowisata berbasis masyarakat dengan typology agrowisata yang lengkap dan sesuai karakter Malino, seperti halnya pengembangan kampong agrowisata hortikultura.
- 5) Pemerintah, biro travel, dan berbagai stakeholder terkait perlu melakukan kerja sama dalam promosi yang terintegrasi untuk meningkatkan kunjungan ke destinasi agrowisata.

## **VIII. Analisis Penilaian Kinerja berdasarkan Balanced Score Card di Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

### **a. Abstrak**

Rumah sakit sebagai salah satu Badan Layanan Umum (BLU) yang telah ditetapkan Undang-Undang dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan berorientasi kepada kepuasan pasien. Oleh karena itu dibutuhkan indikator pengukuran kinerja yang komprehensif untuk mengukur pencapaian sekaligus merumuskan cara untuk menjadi organisasi yang lebih baik melalui 4 perspektif Balanced Scorecard (BSC). BSC merupakan metode pengukuran kinerja suatu organisasi dengan melihat empat perspektif yakni Pembelajaran dan Pertumbuhan, Proses Internal Pelayanan, pelanggan dan keuangan. Namun saat ini, Rumah Sakit Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum menggunakan 4 (empat) perspektif Balanced Scorecard tersebut dalam pengukuran kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pada 7 Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Jenis penelitian yang digunakan adalah mix-methods dengan exploratory sequential design. Penelitian dilakukan pada 7 rumah sakit daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari: RSUD Labuang Baji, RSUD Haji, RSUD Sayang Rakyat, RSKDIA fatimah, RSKDIA Pertiwi dan RSKD Dadi, RSKDGM Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel penelitian terdiri dari direktur rumah sakit, pihak manajemen rumah sakit, karyawan, pasien, dan dokumen data sekunder yang digunakan untuk mengukur tanggungjawab dalam evaluasi kinerja insitusi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian telah memperoleh indikator kinerja umum rumah sakit provinsi berdasarkan pendekatan BSC yang terdiri dari: 75 Indikator umum dan Indikator Khusus yang berbeda beda pada setiap rumah sakit. Hasil pengukuran kinerja berdasarkan BSC diperoleh 1. dari tujuh rumah sakit tersebut tidak ada rumah sakit yang berada pada kategori baik. Ketujuh rumah sakit berada penialain kategori kinerja sedang yaitu kategori sedang (BBB) yaitu RSKDIA Fatimah (72,75), RSKD Dadi (71, 2835), RS Labuang Baji (70,90), RSUD Sayang Rakyat (69,70), dan RSUD Pertiwi (68,688). Sedangkan kategori sedang (BB) yaitu RSUD Haji (60,9) dan RSKDGM (47,36). Penelitian ini disarankan untuk dapat menjadi indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja 7 Rumah Sakit daerah provinsi sulawesi selatan.

## **b. Latar Belakang**

Kinerja organisasi merupakan output yang dihasilkan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan mampu menggambarkan kondisi organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Evaluasi terhadap kinerja dalam Rumah sakit menjadi hal yang penting. Dengan adanya evaluasi, maka organisasi akan mampu mengukur seberapa jauh perkembangannya ketika dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Hal ini bukan hanya dilakukan untuk melihat pencapaian, tetapi juga untuk merumuskan cara untuk menjadi organisasi yang lebih baik (Kairu., et al, 2013).

Rumah sakit sebagai institusi layanan publik telah diamanahi oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berpegang pada perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan agar Rumah sakit mampu meningkatkan pelayanan yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat. Rumah sakit adalah sebuah organisasi yang memiliki berbagai fungsi manajemen yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna. Sebagaimana menurut WHO (World Health Organization), bahwa Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka rumah sakit harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Hal ini karena dalam aktifitas yang sedemikian kompleks, akan ada banyak proses tahapan dan sasaran yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan outcome yang baik. Menurut R. Terry dalam (Sedarmayanti, 2016), proses manajemen terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan dan dilakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi rumah sakit untuk menentukan apakah fungsi-fungsi manajemen tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian fungsi manajemen tersebut dapat dilakukan dengan pemetaan terhadap indikator kinerja dengan cara mengukur hubungan dan pengaruh antar kinerja di rumah sakit.

Rumah sakit adalah salah satu Badan Layanan Umum (BLU) yang telah ditetapkan Undang-Undang. Oleh karena itu, ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan berorientasi kepada kepuasan pasien merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Hal ini berarti bahwa rumah sakit dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, tentu saja rumah sakit harus didukung oleh dana, sumber daya manusia yang bermutu dan profesional serta peralatan yang memadai (Parmita, 2015).

Pemerintah telah menerbitkan PP no. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit, yang menjadi dasar dalam pengelolaan rumah sakit. Dalam PP tersebut telah memberikan kesempatan

yang lebih luas kepada rumah sakit untuk menyediakan pelayanan berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. Oleh karena rumah sakit dituntut untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, yang terukur dan menjadi dasar untuk mengembangkan pelayanannya. Pengukuran kinerja yang dilakukan harus komprehensif pada berbagai aspek.

Dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 telah menetapkan cara penilaian kinerja yang diatur dalam, pasal 18 ayat 3, yang berbunyi “Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, Pembelajaran dan Pertumbuhan”, yang mana penilaian ini mengacu kepada 4 perspektif Balanced Scorecard (BSC). Hal yang sama yang dituangkan didalam Permendagri Nomor 86 un 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Selain itu, dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 36/PB/2016 tentang “Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, yang mana semua tata cara penilaian menggunakan perspektif Balanced Scorecard (BSC).

Metode BSC dianggap merupakan metode yang ideal untuk diterapkan mulai dari proses menyusun perencanaan hingga penilaian kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan metode BSC memiliki efek positif pada Proses Internal Pelayanan organisasi, melalui pengendalian terhadap proses manajemen yang terdiri dari aspek finansial dan nonfinansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BSC mampu meningkatkan efisiensi dalam mengelola rumah sakit melalui ukuran kinerja yang jelas dan transparan. Hal ini konsisten dengan temuan yang dilaporkan dalam studi oleh Karra dan Papadopoulos (2005) dan Ukko, Tenhunen, dan Rantanen (2007), temuan dari penelitian ini juga mengungkapkan bahwa BSC telah meningkatkan efisiensi Proses Internal Pelayanan rumah sakit (Shukri & Ramli, 2015).

Balanced Scorecard merupakan sebuah pengembangan dari cara pengukuran keberhasilan organisasi di dalam perusahaan dengan mengintegrasikan beberapa teknik pengukuran atau penilaian kinerja terpisah-pisah. (Hadari Nawawi, 2006:212). Sebagai suatu metode pengukuran kinerja, BSC lebih dari sekedar sebuah sistem pengendalian tetapi BSC merupakan suatu metode yang digunakan sebagai sistem komunikasi, informasi dan pembelajaran. Adapun tujuan dari model ini adalah untuk memberikan manajer dan pemimpin pandangan yang komprehensif tentang bisnis dan memungkinkan mereka untuk fokus pada bidang-bidang kritis, seperti (1) perspektif pelanggan, (2) perspektif keuangan, (3) perspektif bisnis internal, dan (4) inovasi dan pembelajaran (Wongrassamee, Gardiner dan Simmons, 2003). Dengan menggabungkan langkah-langkah finansial dan langkah-langkah non-finansial dalam satu laporan, BSC bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih variatif dan lebih relevan tentang kegiatan yang dikelola. (Sunhilde, 2009).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki 7 Rumah Sakit Daerah yang terdiri dari 3 Rumah sakit Umum (RSUD Labuang Baji, RSUD Haji, RSUD Sayang Rakyat) dan 4 Rumah sakit Khusus (RSKD Dadi, RSKDIA Fatimah, RSKDIA Pertiwi, dan RSKDGM Provinsi Sulawesi Selatan). Rumah sakit tersebut tentunya telah melakukan pengukuran kinerja namun pendekatan yang dilakukan belum komprehensif dan masih mengukur kinerja dari perspektif keuangan saja dan tidak melihat perspektif non keuangan. Saat ini pengukuran kinerja yang berlaku pada 7 rumah sakit tersebut belum menggunakan 4 (empat) perspektif dalam pendekatan Balanced Scorecard yang tentunya lebih komprehensif. Oleh karena itu, dengan mempelajari fenomena tersebut diatas, maka peneliti bertujuan untuk melakukan analisis penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard pada 7 Rumah sakit Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **c. Rekomendasi**

1. Pemerintah Provinsi perlu membentuk tim penyusun Peraturan Gubernur tentang Indikator Penilaian Kinerja RSD BLUD Provinsi Sulawesi Selatan berdasar indikator yang dihasilkan dalam penelitian ini
2. Pemerintah Provinsi perlu melakukan advokasi terkait indikator penilaian yang dihasilkan dalam penelitian ini untuk dapat juga digunakan dalam menilai kinerja RSD BLUD di Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pemerintah Provinsi perlu membentuk tim sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Indikator Penilaian Kinerja RSD BLUD Provinsi Sulawesi Selatan
4. Pemerintah Provinsi perlu membentuk tim independen Penilaian Kinerja RSD BLUD Provinsi Sulawesi Selatan
5. Rumah Sakit perlu mengembangkan sistem dan prosedur terkait pengumpulan data secara indikator penilaian
6. Kepada tim penilai agar melaksanakan Penilaian Kinerja RSD BLUD Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan setiap tahunnya
7. Pelaporan hasil penilaian diharapkan untuk dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan oleh Tim Penilai dengan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit paling lambat 1 bulan setelah penilaian dilakukan.

## **IX. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Hilirisasi Pengelolaan Industri Kreatif di Sulawesi Selatan**

### **a. Abstrak**

Kegiatan penelitian yang dilakukan di Sulawesi selatan dengan judul penelitian “Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan industri kreatif di sulawesi selatan” bertujuan untuk mengetahui kegiatan hilirisasi melalui Kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan maupun pemanfaatan teknologi. Jenis penelitian ini berdasarkan analisis datanya adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari tujuh Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan yaitu Bulukumba, Makassar, Maros, Pare-Pare, Tana Toraja, Palopo dan Wajo. Penentuan sampel berdasarkan kriteria (purposive Sampling) yaitu keterwakilan wilayah. Metode pengumpulan data menggunakan Tri Angulasi

yang terdiri dari Kuesioner, Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, dan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi memberikan dampak Positif dan signifikan dalam kegiatan hilirisasi. Ketersediaan bahan baku juga memberikan dampak positif dalam kegiatan hilirisasi namun tidak signifikan.

## **b. Latar Belakang**

Pengembangan daerah provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam perubahan RPJMD 2018-2023 diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik

Rencana Tata Ruang Nasional, maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mewujudkan ruang Sulawesi Selatan yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkelanjutan, yang diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur wilayah, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada RTRWP Sulawesi Selatan yang diharapkan dapat mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan melalui pengembangan kawasan budidaya diantaranya meliputi kawasan perikanan, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan pertambangan. Pengembangan daerah provinsi Sulawesi Selatan ini didasarkan pada visi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 : Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Pengembangan daerah provinsi Sulawesi Selatan dilakukan guna mendukung tumbuh dan berkembangnya iklim usaha kecil menengah dan koperasi yang terangkum dalam sistem perekonomian kerakyatan maupun industri kreatif. Sistem ekonomi kerakyatan dapat dikatakan suatu sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Karena ekonomi kerakyatan sendiri merupakan kegiatan perekonomian atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi yang mampu diusahakan dan dikuasanya. Ekonomi kerakyatan perlu dikembangkan tidak hanya dalam bentuk koperasi, usaha kecil dan menengah, tetapi juga melingkupi ekonomi atau industri kreatif. Mengapa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan?

Kontribusi sektor industri kreatif terhadap Produk domestik Bruto (PDB) secara nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama masa sebelum pandemik covid 19 melanda dunia termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Badan Ekonomi Kreatif mencatat kontribusi sektor ekonomi kreatif. Raihan tingkat kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB ini boleh dikata tidaklah kecil. Angka 7,28 persen menempatkan kontribusi sektor industri kreatif di Indonesia di atas raihan negara lain seperti Kanada (4,63 persen), Singapura (5,90 persen), Filipina (5,24 persen), dan Rusia (6,12 persen).

Jumlah pekerja di sektor ini juga tidak bisa dibilang sedikit. Data Badan Ekonomi Kreatif mengungkap ada 17,7 juta pekerja ekonomi kreatif pada 2017 atau 14,61 persen dari jumlah tenaga kerja nasional. Bekraf menganggap pekerja industri ekonomi kreatif harus didorong agar memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Data Bekraf menunjukkan ada 93,7 persen pekerja ekonomi kreatif di Indonesia yang termasuk kategori blue collar atau pekerja kasar, tenaga produksi, tenaga usaha jasa dan tenaga usaha penjualan. Sisanya, 6,2 persen pekerja di sektor ini termasuk kategori white collar atau tenaga profesional, teknisi, dan tenaga yang bersangkutan di bidangnya. Hal ini menjadi salah satu masalah dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Dari sisi populasi sumber daya manusia provinsi Sulawesi Selatan menurut BPS tahun 2021 sebanyak 8.956.181 orang. Bila dilihat hanya dari sisi ini belumlah cukup untuk dapat mengembangkan industri kreatif, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau skil yang kompeten di sektor industri kreatif. Salah satu indikator dalam menilai skil atau kemampuan sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Menurut data BPS yang diterbitkan tahun 2021, membagi tingkat pendidikan ke dalam tiga kategori berikut ini : Populasi dengan tingkat pendidikan SMA atau setara ke atas sebesar 39,44%, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebesar 42,46% dan tidak memiliki ijazah sebesar 18,10%. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan di Sulawesi Selatan relatif rendah yang berkorelasi dengan tingkat kemampuan atau skill seseorang.

Pengembangan industri kreatif juga erat kaitannya dengan ketersediaan bahan baku dan penggunaan teknologi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan bahan baku industri kreatif di Sulawesi Selatan cukup memadai, namun yang perlu menjadi perhatian adalah dari aspek sumber bahan baku, kuantitas dan kualitas maupun dari aspek distribusi. Sedangkan dari aspek penggunaan teknologi pada bagian produksi dan penjualan belum dilakukan secara maksimal. Dari kunjungan awal yang dilakukan pada beberapa sentra industri kreatif, penggunaan teknologi pada bagian produksi dan pemasaran, masih sangat rendah atau terbatas. Salah satu contoh pada bagian pemasaran industri kreatif masih dilakukan secara konvensional yaitu pada saat diadakan pameran produk industri kreatif.

Berdasarkan data sumbangan sector industri kreatif terhadap PDB, sangat tepat bila menempatkan sektor ekonomi kreatif sebagai sektor strategis untuk dikembangkan termasuk di daerah provinsi Sulawesi selatan. Sulawesi Selatan memiliki potensi alam dari berbagai sektor yang cukup baik dikembangkan guna mendukung bahan baku sektor ekonomi kreatif. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan serta kelautan dan perikanan. Sektor-sektor tersebut merupakan sumber-sumber bahan baku yang berada di hulu bila dikelola secara lebih baik, melibatkan kreativitas dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset (termasuk penggunaan teknologi) dengan tujuan hilirisasi produk, tentu akan mendatangkan keuntungan lebih bagi masyarakat.

Dampak dari perkembangan industri kreatif di Sulawesi Selatan belum memberikan hasil secara maksimal terhadap peningkatan PDRB Sulawesi Selatan. Beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan memiliki tingkat

pertumbuhan ekonomi yang sangat kecil bahkan masih berkontraksi di tahun 2021. Sulawesi Selatan yang memiliki 24 kabupaten dan kota, enam diantaranya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi paling rendah.

Bila melihat sumbangan sektor industri kreatif terhadap peningkatan PDB secara nasional, adalah pertanda yang cukup baik menjadikan sektor industri kreatif sebagai salah satu sektor andalan dalam pemulihan krisis ekonomi pasca pandemic covid 19 yang telah melanda dunia termasuk Indonesia yang berakibat terhadap penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang demikian drastis.

Dorongan ini dapat dilakukan mulai dari peningkatan kemampuan (skil) sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku dan penggunaan teknologi tepat guna dalam menghasilkan produk industri kreatif yang dapat memenuhi harapan konsumen. Penataan kelembagaan usaha pun harus mendapat perhatian serius. Kelembagaan usaha yang disesuaikan dengan kultur dan budaya masyarakat kita yang berdasarkan asas usaha bersama dalam mencapai kemakmuran bersama. Kelembagaan usaha dimaksud adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama oleh masyarakat setempat, mulai dari penyediaan baku, proses produksi hingga menjadi barang siap jual. Dengan pola ekonomi kerakyatan diharapkan dapat saling menguntungkan antara penyedia bahan baku dan pelaku usaha industri kreatif melalui kegiatan kolaborasi untuk saling memperoleh keuntungan yang lebih baik.

### **c. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan beberapa Rekomendasi sebagai berikut:

1. Kabupaten Bulukumba
  - a. Pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi, harus menciptakan lingkungan yang mampu mendorong perkembangan UMKM secara mandiri, sistematis, dan berkelanjutan.
  - b. Kerja sama dalam menyediakan akses kredit bagi pelaku UMKM dengan bunga rendah.
  - c. Membentuk inkubasi bisnis dan sentral bisnis produk local.
2. Kota Makassar
  - a. Membentuk ekosistem bisnis industri kreatif.
  - b. Menciptakan lingkungan dan persaingan sehat yang mampu mendorong perkembangan UMKM secara mandiri, sistematis, dan berkelanjutan.
  - c. Melakukan pendampingan untuk menjamin ketersediaan bahan baku
3. Kabupaten Maros
  - a. Merancang pola pembinaan industry kreatif untuk meningkatkan daya saing
  - b. Melakukan pendampingan untuk menjamin ketersediaan bahan baku
  - c. Membuka akses permodalan, bekerjasama dengan perbankan
4. Kabupaten Tana Toraja
  - a. Merancang pola pembinaan industry kreatif untuk meningkatkan daya saing

- b. Membentuk inkubasi bisnis
  - c. Melakukan pendampingan untuk menjamin ketersediaan bahan baku di setiap daerah
  - d. Menciptakan lingkungan bisnis yang sehat serta persaingan yang kompetitif sesama pelaku industri
5. Kota Palopo
    - a. Membentuk inkubasi bisnis dan sentral bisnis produk local.
    - b. Membuka akses permodalan, bekerja sama dengan perbankan
    - c. Membuka akses pemasaran local modern dan internasional
  6. Kabupaten Wajo
    - a. Membuka akses pemasaran local modern dan internasional
    - b. Melakukan pembinaan terhadap pelaku industry kreatif sub bidang kriya
    - c. Membentuk sentral pembibitan bahan baku produk kain sutra
    - d. Membuka akses permodalan, bekerja sama dengan perbankan
  7. Kota Pare-pare
    - a. Membentuk inkubasi bisnis dan sentral bisnis produk local.
    - b. Membuka akses pemasaran local modern dan internasional
    - c. Melakukan pendampingan untuk menjamin ketersediaan bahan baku.

## **X. Penelitian Pengembangan Bibit Porang Super *Amorphophallus muelleri* Blume Sulawesi Selatan Berbasis Teknologi Biofertilizer Mikrobioma**

### **a. Abstrak**

Porang merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki banyak manfaat dan sangat diminati saat ini, namun belum didukung dengan ketersediaan bibit yang cukup. Pembudidayaan porang masih menggunakan metode konvensional yakni menggunakan pupuk sintetis yang banyak menyebabkan inefisiensi pemupukan. Efisiensi pemupukan dapat dilakukan dengan memanfaatkan bakteri dan jamur yang dapat mengikat nitrogen, melarutkan posfat, dan menghasilkan zat pengatur tumbuh. Tujuan penelitian ini adalah memformulasikan konsorsium bakteri dan jamur untuk membuat pupuk hayati yang diaplikasikan pada tanaman porang dari dua jenis bibit, yakni bibit dari umbi dan bibit dari umbi katak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial. Penelitian diawali dengan preparasi isolat mikroba, pembiakan dan fermentasi isolat kandidat pupuk, uji viabilitas mikroba, pembuatan formulasi pupuk hayati, dan pengujian lapang dengan mengukur tinggi dan jumlah daun porang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat sejumlah bakteri (*Alcaligenes faecalis*, *Bacillus polymixa*, *Bacillus subtilis*, *Stenotrophomonas rhizopila*, *Bacillus nitratireducens*, *Stenotrophomonas maltophilia* dan *Bacillus nitratireducens*) dan jamur (*Aspergillus niger*, *Rhizopus sp* dan *Penicillium sp*) yang dibuat menjadi 5 formulasi pupuk dengan masing-masing 10 konsentrasi. Berdasarkan nilai viabilitas bakteri, formulasi pupuk 2 sampai 5 adalah yang paling direkomendasikan. Sedangkan berdasarkan viabilitas jamur, pupuk yang lebih direkomendasikan adalah formula 1, 2, 3, dan 5. Pemberian kelima pupuk tersebut memberikan pengaruh yang sama terhadap jumlah daun porang, baik benih dari umbi maupun katak. Sedangkan untuk pengamatan

tinggi tanaman, pengaruh yang paling nyata terlihat pada tanaman porang yang diberi perlakuan pemupukan pada konsentrasi kesepuluh

## **b. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis memiliki potensi di sektor pertanian yang cukup besar. Sebagai negara agraris sebagian mata pencahariannya adalah petani. Sektor pertanian dapat menopang sektor pertumbuhan ekonomi Indonesia dimasa depan dan saat ini, dikarenakan dari sisi produksi merupakan sektor kedua yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan masih diatas sektor lainnya seperti perdagangan dan konstruksi. Bahkan ketika sejumlah sector perekonomian mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan dimasa pandemic. Hal berbeda justru dicatatkan oleh sektor pertanian (M Arif Anugrah (2021) dalam Yuniarsih, 2021). Berbagai komoditas pertanian memiliki kelayakan yang cukup baik untuk dikembangkan di Indonesia, salah satunya umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan salah satu komoditas pertanian yang memberikan peluang cukup besar terhadap keanekaragaman pangan dan kecukupan gizi masyarakat karena mengandung vitamin, mineral dan serat (Komarayanti dalam Marita, 2019).

Porang *Amorphophallus muelleri* merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian, dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis dan dikelompokkan dalam familia Araceae dari kelas Monokotiledoneae. Porang termasuk tumbuhan semak (herba) yang dapat diperbanyak dengan beberapa cara termasuk biji (Aziz et al, 2014), stek daun, bulbil, dan umbi (Imelda et al, 2008). Umbi porang terdiri atas dua macam, yaitu umbi batang yang berada di dalam tanah dan umbi katak biasanya disebut bulbil (umbi daun) yang terdapat pada setiap pangkal cabang atau tangkai daun. Kedua umbi tersebut digunakan dalam perkembangbiakkan tanaman porang secara vegetatif. Umbi yang banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah umbi batang yang berbentuk bulat dan besar (Sari dan Suhartati, 2015), yang mengandung glukomanan yang bernilai ekonomi tinggi dan telah diekspor ke beberapa negara (Gusmalawati et al, 2013). Glukomannan adalah karbohidrat low digestible yang banyak digunakan dalam industri obat, makanan dan minuman, kosmetika dan sebagainya (Santosa, 2014). Manfaat tepung umbi porang dalam industri pangan, yaitu sebagai bahan pengikat (binder), pengental (thickener), dan campuran jeli.

Porang merupakan tanaman potensil untuk dikembangkan sebagai komoditi ekspor karena beberapa negara membutuhkan tanaman ini sebagai bahan makanan maupun bahan industri. Adanya banyak manfaat yang dapat diperoleh dari Porang menyebabkan permintaan Porang selalu meningkat setiap tahunnya, bahkan pasokan Porang dalam negeri belum dapat memenuhi permintaan pasar luar negeri. Indonesia mengekspor porang dalam bentuk gaplek atau tepung kebeberapa negara seperti Jepang, Australia, Srilangka, Malaysia, Korea, selandia Baru, Pakistan, inggris dan Italia, dengan nilai ekspor yang terus meningkat . Menurut data Badan Karantina (2019) sampai dengan Oktober 2019 terjadi peningkatan ekspor Porang sebanyak 11.3 ribu ton dengan nilai ekonomi Rp. 226.4 milyar dibanding tahun 2018 yaitu 11 ribu ton dengan nilai Rp. 220 milyar. Tingginya permintaan tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan tanaman porang. Hal ini disebabkan oleh

pembudidayaan tanaman porang yang saat ini masih menggunakan metode konvensional, sehingga produktivitas tanaman porang juga masih sangat terbatas.

Kementerian pertanian tengah mendorong potensi umbi porang untuk dikembangkan lagi sehingga potensi ekspor terus meningkat, dan hingga saat ini salah satu keterbatasan ekspor porang di Indonesia terletak pada penyediaan bahan baku yang masih terbatas, sehingga Kementerian pertanian mendorong potensi pengembangan budidaya porang, Untuk Pengembangan tanaman porang pemerintah mengalokasikan pada tahun 2020 seluas 17.886 Ha, yaitu di provinsi Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, NTT dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan pilot proyek porang seluas 10 Ha dan pengembangan seluas 564 ha ( Nanang, 2020). Sulawesi Selatan menduduki posisi ketiga sebagai penghasil porang terbaik di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah Pada Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan mendapat alokasi kegiatan porang seluas 20 ha di 11 Kabupaten. Diantaranya, Kabupaten Soppeng, Sidenreng Rappang, Wajo, Sinjai, Barru, Maros, Bantaeng, Takalar, Bulukumba dan Luwu Utara dengan bantuan full paket benih dan pupuk.

Budidaya Porang di Sulawesi Selatan saat ini masih berbasis pertanian konvensional dengan bertumpu pada penggunaan bibit lokal dan pupuk sintetis. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya porang adalah pemilihan bibit tanaman. Pemilihan bibit tanaman merupakan langkah awal yang menentukan kualitas suatu produk pertanian yang akan dihasilkan. Pemilihan bibit yang bermutu sangatlah penting karena akan mengurangi resiko kegagalan budidaya yang diakibatkan kondisi lahan, serangan hama dan penyakit, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil panen yang sesuai dengan harapan (Hidayat et al, 2021).

Tersedianya bibit yang bermutu dalam waktu dan jumlah yang tepat serta harga yang terjangkau menjadi salah satu faktor pendukung bagi upaya pengembangan pembibitan. Oleh karena itu perkembangan industri pembibitan maupun penangkar bibit perlu mendapatkan dukungan berbagai pihak untuk tercapainya penyediaan bibit yang bermutu, "True to Type" yang memadai.

Bibit tanaman porang bersifat polyembrioni yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya adalah berupa: (1) Biji, (2) Bulbil (Katak), (3) Umbi (mini dan kecil) dan (4) Bibit hasil kultur jaringan. Kementerian Pertanian telah memfasilitasi peningkatan produksi komoditas ekspor dalam hal ketersediaan benih porang yang bermutu adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620/Hk.140/C/04/2020 tentang petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan yang pada butir O yang mencantumkan persyaratan dan prosedur sertifikasi benih porang yang dapat dilakukan melalui sertifikasi benih baku, sertifikasi pemurnian varietas dan sertifikasi benih varietas lokal. Bahwa tanaman porang ini baru terdaftar pada Kepmentan Nomor 104 /KPTS/HK.140/M/2 /2020 tentang jenis komoditas binaan lingkup tanaman pangan Kementerian Pertanian sehingga masih banyak aspek pertanaman yang harus dipelajari guna mendukung pelaksanaan sertifikasi benih porang dan permintaan pelabelan benih dari produsen maupun kelompok tani di daerah.

Selain penggunaan bibit dari varietas unggul, produksi porang juga di pengaruhi oleh penggunaan pupuk, saat ini petani porang masih menggandakan pupuk kimia dalam meningkatkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk sintetik ini, jika digunakan secara terus menerus akan membuat efek yang tidak baik bagi tanah atau lahan untuk pembudidayaan. Penggunaan pupuk sintetik juga dipermasalahkan pada rendahnya tingkat penyerapan hara oleh tanaman (inefisiensi pemupukan). Efisiensi pemupukan yang rendah menjadi permasalahan yang ditandai dengan banyaknya nitrogen yang terbuang dalam proses volatilisasi amonia, denitrifikasi, aliran permukaan dan pencucian nitrat (Purnamasari dkk., 2016). Inefisiensi pemupukan juga menyebabkan peningkatan laju emisi gas rumah kaca melalui pencemaran N<sub>2</sub>O (Jumadi, 2011). Faktor utama inefisiensi pemupukan nitrogen dapat dilihat dari proses nitrifikasi amonium (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) ke nitrit (NO<sub>2</sub><sup>-</sup>) menjadi nitrat (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>). Pengkonversian ion-ion tersebut menghasilkan produk sekunder berupa gas N<sub>2</sub>O (Jumadi, 2018). Permasalahan-permasalahan tersebut merujuk pada efisiensi pemupukan masih sangat rendah yaitu hanya menyerap 20-30% nitrogen sedangkan sisanya hilang dalam bentuk nitrat dan gas nitrifikasi (Hartatik dan W, 2018; Fageria, 2009).

Peningkatan produktivitas tanaman porang dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi penyerapan hara dari tanah melalui penggunaan pupuk organik. Pemberian pupuk organik yang telah dilakukan saat ini belum menunjukkan adanya interaksi yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman porang (Fatoni, dkk., 2018). Hal ini disebabkan oleh penggunaan pupuk yang masih belum terstandarisasi baik dari segi takaran, kandungan hara serta mikroorganisme yang berperan di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan inovasi berbasis bioteknologi untuk memproduksi pupuk yang memiliki efisiensi unsur hara yang tinggi, ramah lingkungan dan juga terstandarisasi. Pupuk hayati dengan memanfaatkan teknologi konsorsium mikroba (mikrobioma) adalah solusi yang bisa dikembangkan untuk menunjang peningkatan produktivitas tanaman Porang. Teknologi mikrobioma memanfaatkan beberapa jenis komunitas mikroba seperti mikroba penambat nitrogen untuk ketersediaan unsur nitrogen (Zhu et al, 2016), mikroba pelarut fosfat untuk kesediaan phosfat (Adnan et al, 2020), mikroba endofit untuk ketersediaan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) (Taghinasab et al, 2020) dan Mikoriza yang berperan dalam penambatan nitrogen, pelarutan phosfat dan juga menjaga ketersediaan air untuk tanaman di lahan kering (Irakhah et al, 2020).

Tanaman porang yang dibudidayakan dengan memanfaatkan teknologi biofertilizer mikroba diharapkan dapat tumbuh dengan lebih baik karena terjadi peningkatan efisiensi penyerapan hara yang dibantu oleh mikroba. Peningkatan produktivitas tanaman porang yang diberikan biofertilizer berbasis mikroba tersebut juga akan berdampak pada peningkatan produksi bibit katak (bubil). Bibit yang berasal dari indukan tanaman porang yang telah diberi perlakuan biofertilizer berbasis teknologi mikroba inilah yang kedepannya akan menjadi kandidat bibit porang super. Tingginya efektivitas penyerapan hara oleh indukan tanaman porang yang telah diberi biofertilizer berbasis teknologi mikroba diharapkan akan meningkatkan kandungan nutrisi pada bibit katak yang dihasilkan. Selain itu, adanya konsorsium mikroba pada biofertilizer yang digunakan juga

diharapkan dapat meningkatkan produksi glukomanan pada porang dan bibit porang yang dihasilkan. Bibit porang super dapat meningkatkan nilai ekonomi dari porang itu sendiri sebab memiliki nilai lebih seperti tahan penyakit, kadar kalsium oksalat yang rendah, kandungan glukomanan yang tinggi, serta pertumbuhan dan produktivitas yang tinggi. Ketersediaannya pun dapat terus terjaga karena didukung oleh sistem pertanian berkelanjutan berupa pertanian dengan menggunakan biofertilizer yang ramah lingkungan dan dapat menjaga kesuburan tanah

### **c. Rekomendasi**

- 1) Pupuk cair organik dengan formulasi mikrobioma 1-5 direkomendasikan penggunaannya dalam budidaya porang karena terbukti dapat meningkatkan produksi bibit porang.
- 2) Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji kelayakan usaha tani porang dari aspek sosial ekonomi dan lingkungan
- 3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memprioritaskan program penyediaan bibit unggul yang bersertifikat baik dari umbi maupun katak dari hasil indukan produksi bibit porang puca untuk peningkatan produktivitas dan kualitas porang.

## **XI. Kajian Pengembangan dan Budidaya Jeruk Pangkep**

### **a. Abstrak**

Konsumsi jeruk dalam negeri menunjukkan peningkatan 10 persen setiap tahun, hal ini ditunjang dengan meningkatnya jumlah penduduk, gaya hidup, dan fasilitas tataniaga. Jeruk pangkep (*Citrus grandis* L.Osbeck, *Citrus maxima* Merr) merupakan tanaman andalan Kabupaten Pangkep yang tersebar dominan pada dua kecamatan. Namun dalam lima tahun terakhir terlihat adanya penurunan produksi Jeruk Pangkep yang cukup signifikan padahal banyak petani yang menggantungkan hidupnya pada tanaman ini. Oleh sebab itu kajian tentang pengembangan dan budidaya Jeruk Pangkep terutama dalam konteks nilai ekonomi, praktik budidaya, kelembagaan, dan kebijakan menjadi sangat penting. Kajian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan memetakan peran para pihak dalam pengembangan dan budidaya Jeruk Pangkep dari hulu ke hilir, (2) menganalisis potensi, peluang dan tantangan pengembangan komoditas Jeruk Pangkep dari sektor hulu hingga hilir dilihat dari aspek ekonomi, lingkungan, kelembagaan, pemberdayaan, kebijakan dan GESI, dan (3) merekomendasikan kebijakan berbasis pengetahuan dan program intervensi pengembangan komoditas Jeruk Pangkep. Untuk memenuhi tujuan tersebut, kajian ini bertumpu pada pendekatan kualitatif. Namun untuk memenuhi tujuan aspek ekonomi, data yang digunakan data kuantitatif. Sehingga analisis dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dari data kualitatif dan kuantitatif. Kajian yang dilakukan di kecamatan Ma'rang dan Labakkang sebagai sentra produksi jeruk pangkep melibatkan 40 petani responden. Selain itu ditentukan juga informan lain yakni pelaku pemasaran, pemerintah daerah, dan penyukuh lapangan. Hasil penelitian adalah (1) para pihak yang terlibat dalam usahatani jeruk pangkep adalah kelompok tani,

penyuluh pertanian, lembaga pemasaran, Dinas Pertanian dan Bappeda. Tiap para pihak bekerja masih terfragmentasi.

(2) Penetapan kelompok tani, gapoktan, dan penyuluh melalui SK Bupati tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kapasitas petani jeruk pangkep dalam hal budidaya. Hal ini menyebabkan petani berada dalam posisi rentan dan terlihat adanya penurunan produksi secara signifikan. Peluang pengembangan jeruk pangkep masih terbuka, problem utama adalah kondisi tanaman yang membutuhkan penanganan peremajaan dan perawatan serta peningkatan kesuburan tanah, (3) Pemerintah perlu mengambil langkah strategis terutama dalam perbaikan lahan, teknis budidaya, penanganan pasca panen, dan pemasaran jeruk segar dan hasil olahan.

## **b. Latar Belakang**

Jeruk adalah komoditas yang bernilai ekonomi tinggi (high economic value commodity) dan merupakan salah satu buah yang cukup banyak digemari masyarakat pada berbagai kalangan. Rasa, kemudahan cara menyajikan dan mengonsumsi jeruk, harga buah yang relatif murah, daya simpan buah yang cukup lama, urban life style serta kandungan gizi yang tinggi mendorong minat masyarakat untuk mengonsumsi buah ini cukup tinggi (Mäkynen, K. et al. 2013; Dao, T. P. et al. 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek permintaan jeruk cukup menjanjikan, baik dari sisi usia, kelas sosial, tingkat pendidikan maupun geografi (Muhammad, T dan Santoso, 2015). Kondusifnya permintaan jeruk harus dijawab oleh sisi penawaran yakni kecukupan produksi jeruk yang didukung oleh political will pemerintah yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama pelaku usaha tani jeruk.

Diperkirakan, kecenderungan konsumsi jeruk dalam negeri akan meningkat sebesar 10 persen setiap tahun. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan gaya hidup penduduk. Jeruk pangkep (*Citrus grandis L.Osbeck*, *Citrus maxima Merr*) atau lebih populer disebut Jeruk Bali atau Jeruk Besar merupakan salah satu buah eksotis tropika Indonesia yang sudah lama dikenal oleh masyarakat. Mungkin masih banyak orang yang terasa asing dengan buah Jeruk pangkep. Keberadaan Jeruk pangkep masih terabaikan sangat disayangkan mengingat besarnya potensi yang disimpan buah seukuran bola voli tersebut. Padahal, di pasar Internasional, pamelos merupakan jenis jeruk yang mempunyai nilai perdagangan yang tinggi mendampingi "grapefruit", mandarin, orange, dan lemon. Ternyata, selain memiliki nilai jual tinggi dipasar Internasional, Pamelos juga memiliki khasiat dalam meningkatkan kesehatan tubuh, seperti antioksidan, antikanker, dan dapat melarutkan kolesterol. Konsumen jeruk termasuk Pamelos mempunyai rentan yang luas baik dilihat dari sisi usia, kelas sosial, tingkat pendidikan maupun geografis,"

Jeruk pangkep potensial dikembangkan, karena karakteristiknya yang khas, yaitu berukuran besar, memiliki rasa segar, dan daya simpan yang lama sampai empat bulan. Saat ini produktivitas Jeruk pangkep dari total produksi jeruk yang mencapai 2,41 Ton/Ha pada 2018 dan menjadi 2,06 Ton/Ha pada tahun 2020 (BPS, 2021).

Di Sulawesi Selatan, sentra Jeruk pangkep berada di Kabupaten Pangkep yang populer sebagai Jeruk Pangkep. Pada tahun 2020 Produksi Jeruk

pangkep di Sulawesi Selatan mencapai 355,739 ton (BPS, 2021), di mana Kabupaten Pangkep menyumbang produksi sebesar 23.912,3 ton atau 67,2 persen. Ini berarti sebagian besar Jeruk pangkep yang diperdagangkan dan dikonsumsi di Sulawesi Selatan berasal dari Kabupaten Pangkep.

Namun, produksi Jeruk Pangkep mengalami penurunan selama lima tahun terakhir (2016-2020) yakni dari 37.614 ton menurun menjadi 23.912,3 ton (sekitar 37 persen). Berbagai faktor diduga menjadi penyebab menurunnya produksi Jeruk Pangkep dari tahun ke tahun. Dari aspek budi daya adalah tanaman yang semakin tua sehingga produksi terus menurun dan teknologi budi daya jeruk yang masih konvensional. Sedangkan dari aspek pemasaran, Jeruk Pangkep diduga tidak mampu bersaing dengan Jeruk pangkep dari daerah lain ((Thamrin, M. et al, 2013; Wiyatiningsih, 2020).

Namun, Jeruk Pangkep di Kabupaten Pangkep berpotensi untuk dikembangkan dan dikelola secara agribisnis karena didukung adanya lahan dan agroklimat yang sesuai. Jeruk Pangkep juga merupakan salah satu komoditas yang menjadi perhatian andalan Pemerintah Kabupaten Pangkep sehingga perlu terobosan untuk meningkatkan produksi dan pemasarannya. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Pangkep termuat dalam RPJMD Kabupaten Pangkep. Sesuai dengan komoditas andalan Kabupaten Pangkep, BOLEDONG, yaitu Bolu (Ikan Bandeng), lemo (Jeruk), dan doang (Udang), maka Jeruk Pangkep adalah salah satu andalan Pemerintah Kabupaten Pangkep.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep merasa perlu mempertahankan Jeruk Pangkep sebagai komoditas andalan daerah dan spesifik lokasi karena setiap kabupaten dituntut untuk memperhatikan produk andalan yang berbasis usaha masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pangkep telah menetapkan jeruk pangkep ini sebagai salah satu produk andalan daerah. Dengan demikian pengembangan Jeruk Pangkep perlu memperhatikan faktor faktor pendukung harus didorong semaksimal mungkin, dan faktor penghambat harus diminimalisir sekecil mungkin sehingga potensi tersebut dapat diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebesar besarnya.

Merujuk uraian sebelumnya maka pemerintah Kabupaten Pangkep ingin mengembangkan Jeruk Pangkep sebagai komoditas andalan daerah dengan mengkaji berbagai aspek yang mengedepankan peningkatan daya saing dan daya dorong jeruk ini. Hal ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar pemerintah daerah dapat menggali potensi peningkatan ekonomi baru yang dikelola oleh masyarakat melalui komoditas yang memiliki prospek unggulan.

### **c. Rekomendasi**

- 1) Pelibatan berbagai pihak yang menangani jeruk pangkep diperlukan untuk menjaga informasi dan koordinasi serta menjawab permasalahan yang ditemukan dilapangan
- 2) Perlunya penguatan kelompok tani/ Gapoktan oleh Dinas Pertanian dan Penyuluh pertanian untuk meningkatkan produksi buah jeruk yang berkualitas dan ramah lingkungan
- 3) Mengaktifkan kembali penangkar swadaya dan pengadaan bibit oleh Pemerintah Perlunya mengadopsi teknologi dan metode budidaya serta pemasaran yang lebih moderen yang diminati oleh petani muda milenial

- 4) Orientasi pengembangan jeruk pangkep perlu dilakukan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat lokal dan berbagai sumber daya baik pemerintah, swasta, dan unsur lainnya

## **XII. Kajian Pengembangan Kawasan Perkebunan Jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar**

### **a. Abstrak**

Studi ini disusun untuk mendukung rencana pengembangan kawasan perkebunan jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan penelitian ini meliputi:

- 1) untuk menganalisis sistem kelembagaan, sumber daya, output dan norma budidaya jeruk;
- 2) evaluasi kesesuaian lahan;
- 3) menganalisis kelayakan finansial;
- 4) mengidentifikasi peluang dan kendala pengembangan serta
- 5) menyusun strategi dan program pengembangan kawasan perkebunan jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu mixed method antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan budidaya jeruk dikuatkan dari sisi sejarah, profil petani serta dukungan kebijakan pemerintah. Evaluasi kesesuaian lahan pengembangan kawasan perkebunan jeruk di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa lahan yang sesuai dalam pengembangan kawasan perkebunan jeruk seluas 2.172,6 Ha yang terbagi menjadi dua wilayah yaitu Wilayah Prioritas 1 seluas 998,90 Ha dan Wilayah Prioritas 2 seluas 1.173,86 Ha. Analisis kelayakan finansial dan ekonomi budidaya jeruk menunjukkan nilai kelayakan usaha memiliki nilai yang positif, daya tahan finansial yang cukup tinggi dan mampu memberikan kontribusi kesejahteraan bagi petani dan perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam penentuan faktor internal dan eksternal serta strategi pengembangan kawasan perkebunan jeruk menggunakan analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang tepat digunakan yaitu strategi Strength-Opportunities (SO) yang mengkombinasikan antara faktor kekuatan dan faktor peluang. Kami merekomendasikan kajian selanjutnya adalah strategi pengembangan budidaya jeruk keprok Selayar yang terintegrasi dengan pariwisata Sulawesi Selatan. Selain itu, kajian ini merekomendasikan adanya studi Training Needs Assessment (TNA) untuk menghasilkan usulan pelatihan yang tepat sasaran sehingga masyarakat mampu beradaptasi dengan baik

### **b. Latar Belakang**

Jeruk keprok Selayar menjadi salah satu komoditas hortikultura yang patut mendapat prioritas di Provinsi Sulawesi Selatan. Dinamakan jeruk selayar karena varietas ini pertama kali dikembangkan oleh para petani di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan bahwa Jeruk Keprok/Siam menduduki peringkat pertama produksi buah-buahan di Kabupaten ini dengan capaian produksi sebesar 34.101,5 kwintal pada tahun 2021. Besarnya potensi

jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar bahkan telah mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat. Kabupaten Kepulauan Selayar telah ditetapkan sebagai Kawasan pertanian nasional khusus untuk komoditas jeruk melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/KPTS/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Aturan ini secara jelas menyebutkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya wilayah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan mandat oleh Pemerintah Pusat untuk menjadikan sekaligus mengembangkan Lokasi Kawasan Pertanian Nasional berbasis komoditas jeruk.

Budidaya tanaman jeruk telah lama dikenal oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar bahkan pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Roesmiyanto dan Hutagalung (1989) dalam Muhammad et al., (2003) jeruk pertama kali dimasukkan ke Pulau Selayar pada tahun 1925. Peralihan budidaya dari komoditas lain seperti kelapa, menjadi tanaman jeruk secara masif diperkirakan terjadi pada tahun 1980-an. Pada masa tersebut, terdapat beberapa faktor yang membuat petani memilih untuk mengembangkan jeruk meliputi (Ramadhan et al., 2019): i) Struktur tanah yang ideal untuk ditanami jeruk; ii) Harga jeruk yang stabil; iii) Pemasaran buah jeruk yang dilakukan oleh para petani lebih mudah dibandingkan dengan kelapa; dan iv) Kisah sukses petani yang lebih dahulu menanam jeruk.

Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menjadi daerah penghasil jeruk terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kejayaan perkebunan jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai menghilang diperkirakan pada tahun 1990-an. Hasil penelitian Bappelitbangda (2019) menyebutkan bahwa hilangnya kejayaan jeruk selayar disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, populasi jeruk yang mulai berkurang akibat serangan penyakit menyebabkan produksi jeruk selayar menurun. Kedua, produktivitas pohon jeruk juga mengalami penurunan dari 64 kg/pohon pada tahun 1994 menjadi 20 kg/pohon pada tahun 1997. Ketiga, faktor usia tanaman jeruk yang tua menjadi salah satu penyebab produktivitas jeruk yang menurun. Keempat, kurangnya produksi jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi penyebab kurangnya minat pembeli yang berada di luar pulau untuk mengambil komoditas jeruk di daerah tersebut.

Beberapa intervensi telah beberapa kali diinisiasi oleh berbagai pihak yang salah satunya dilakukan melalui proyek IHDUA/OECF pada akhir tahun 1990-an (Bappelitbangda 2019). Melalui program ini dilakukan pengembangan jeruk selayar dengan total mencapai 1.500 hektare (Muhammad et al., 2003). Namun, hasil temuan lebih lanjut oleh Bappelitbangda (2019) menyatakan bahwa mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2019 eksistensi tanaman jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami penurunan.

Hingga saat ini, upaya mempertahankan eksistensi tanaman jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar masih terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 bahkan menargetkan penambahan luas kebun jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 331 hektar pada tahun 2023. Target ini merupakan turunan dari misi 5 (lima) sasaran 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) yang tertuang di dalam RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-

2023. Sasaran 9 (Sembilan) menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam. Pada sasaran 10 (sepuluh), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga berupaya meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, setiap upaya pengembangan kawasan perkebunan jeruk membutuhkan dokumen perencanaan sehingga di masa yang akan datang kegiatan yang dikembangkan dapat berjalan secara efektif dan optimal (Boyne, 2010; Johnsen, 2021; Edita & Dalia, 2022). Upaya tersebut membutuhkan suatu kajian ilmiah bagaimana peluang dan tantangan termasuk strategi pengembangannya beserta evaluasi finansial dari suatu proyek dan dalam konteks penelitian ini kami kemudian memformulasikannya sebagai “Studi Pengembangan Kawasan Perkebunan Jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar”.

### **c. Rekomendasi**

Menghadapi perubahan besar dalam budidaya jeruk menuju pengembangan kawasan industri jeruk berbasis pariwisata sangat penting untuk mempersiapkan petani untuk dapat beradaptasi. Kami merekomendasikan adanya kajian Training Needs Assessment (TNA) bagi petani jeruk dan implementasi TNA tersebut yang dilakukan secara terjadwal dan terstruktur dalam upaya mempersiapkan mereka terhadap perubahan yang diinginkan di atas..

## **XIII. Analisis PAD Pelabuhan Perikanan Di Sulawesi Selatan (Strategi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Di Sulawesi Selatan Untuk Peningkatan PAD)**

### **a. Abstrak**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, memiliki kewenangan untuk menggali potensi aset yang dimilikinya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah setempat. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan potensi kelautan dan perikanan melimpah yang menjadi faktor penyebab banyaknya masyarakat di Sulawesi Selatan berprofesi sebagai nelayan. Adapun tujuan kajian ini adalah 1) Mengetahui kelengkapan fasilitas pelabuhan perikanan di Sulawesi Selatan yang mendukung pengelolaan pelabuhan, 2) Mengetahui sistem pengelolaan pelabuhan perikanan dan kontribusinya terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 tahun terakhir, dan 3) Menyusun strategi pengelolaan pelabuhan perikanan untuk meningkatkan PAD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan keterwakilan Wilayah Pelabuhan yaitu Pelabuhan Wilayah I PPI Pontap Palopo dan PPI Lonrae Bone serta Pelabuhan Wilayah II PPI Beba Takalar dan PPI Birea Bantaeng. Teknik sampling yang digunakan adalah “purposive sampling” dan wawancara pada 55 pelaku utama aktivitas kepelabuhanan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Analisis SWOT dan diperoleh hasil persentase ketersediaan Fasilitas Pokok dan Fungsional sebesar 59%, Fasilitas penunjang 41% serta Fasilitas pendukung sebesar 2%. Strategi pengelolaan Pelabuhan perikanan untuk peningkatan PAD dilakukan dengan a) Melengkapi Sarana prasarana PPI. b) Melakukan konsolidasi antar *stakeholder* di level pimpinan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pusat. c) Membuat perjanjian kerja sama antar Pemprov dan Pemkab tentang pengelolaan. dan d) Menambah jumlah personil pengelola PPI agar beban kerja terdistribusi.

## **b. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan yang dituangkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) merupakan amanat Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat perubahan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya pada bidang kelautan dan perikanan, pengelolaan PPI yang semula kewenangan Kabupaten/Kota berubah menjadi kewenangan Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) kewenangan pengelolaan laut Daerah Provinsi diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan, dimana kewenangan pengelolaan perairan laut sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari 0-4 mil dan oleh Pemerintah Provinsi kewenangan zonasi lautnya dahulu 4-12 mil. Sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 6/KEPMEN/KP/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, Sulawesi Selatan memiliki Pelabuhan Perikanan di 16 Kabupaten/Kota sebanyak 19 pelabuhan perikanan dengan tujuan yaitu diharapkan sebagai sarana pokok untuk kegiatan usaha penangkapan ikan dan mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap.

## **c. Rekomendasi**

### ***Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan:***

- a. Melakukan konsolidasi lanjutan yang lebih intens antara Stakeholder di level pimpinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait penerapan regulasi tentang pelimpahan kewenangan dan menindaklanjuti surat edaran KPK terkait percepatan penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen (P3D).
- b. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan.
- c. Peningkatan penerimaan PAD Pelabuhan Perikanan melalui:
  - Pendataan kembali aset Pelabuhan Perikanan yang potensial untuk menghasilkan PAD dengan melibatkan OPD Provinsi dan Kab/Kota terkait.
  - Memaksimalkan lahan dan fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan untuk dikerjasamakan dengan pihak tiga (investor).

- Melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi PAD pelabuhan perikanan secara berkala baik mekanisme penarikan retribusi kepelabuhanan berdasarkan regulasi maupun kondisi yang terjadi di lapangan sehingga tidak terjadi kebocoran.

***Untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota:***

- a. Mematuhi regulasi yang telah ditetapkan yaitu:
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pembagian urusan Daerah & Pusat pada Sub Urusan Perikanan Tangkap Terjadi pengalihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sehingga perlu dilakukan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) secara keseluruhan kepada Provinsi Sulawesi Selatan.
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2018 tentang pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka dekonsentrasi dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai tugas pembantuan.
- b. Melakukan sosialisasi dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kepelabuhanan khususnya jasa TPI.

#### **XIV. Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bantaeng**

**a. Abstrak**

Pada tahun 2020, akibat curah hujan yang tinggi di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebabkan banjir bandang di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, salah satunya Bantaeng. Kondisi topografi kawasan perkotaan Kabupaten Bantaeng yang membentang di sepanjang pesisir menyebabkan kawasan ini perkotaannya sangat rentan terhadap banjir. Tujuan kajian ini yaitu mengidentifikasi kejadian banjir, menganalisis faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kejadian banjir, menganalisis kerawanan banjir, menentukan pola ruang kawasan banjir dan merumuskan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan lahan dan air dalam kaitannya dengan kejadian banjir. Kajian penanggulangan dan pengendalian banjir ini berada di Kabupaten Bantaeng, khususnya kawasan perkotaan selama sembilan bulan. Metode analisis yang digunakan yaitu pendekatan berdasarkan kejadian banjir dengan teknologi penginderaan jauh aktif tipe Synthetic Aperture Radar yang dikombinasikan dengan metode Frequency Ratio. Selanjutnya melihat siklus hidrologi wilayah berbasis DAS menggunakan Soil and Water Analysis Tools dengan melihat variabel tanah, tutupan lahan, dan kondisi iklim selama sepuluh tahun terakhir kemudian mensimulasikan kejadian banjir yang akan terjadi menggunakan software simulasi hidraulika Hec-RAS. Hasil kajian ini menunjukkan banjir di Kabupaten Bantaeng tersebar di delapan kecamatan antara lain Bantaeng, Bisappu, Eremerasa, Gantarang keke, Pajukukang, Sinoa, Tompo Bulu dan Uluere dengan total luasan banjir 1.666,29 ha dengan luasan banjir tertinggi berada di Kecamatan Pajukukang seluas 575, 88 ha atau 34,56%. Faktor yang memiliki nilai tertinggi terhadap

kejadian banjir berdasarkan analisis frequency ratio (FR) menggunakan adalah faktor litologi (endapan alluvial) dan faktor tekstur tanah (pasir) dengan nilai FR masing-masing 5,01 dan 4,84. Kelas kerawanan sangat tinggi dan tinggi berada di wilayah hilir DAS yang dekat dari laut meliputi Kecamatan Pajukukang, Bantaeng, Bisappu, Eremerasa dan Gantarang Keke, sedangkan kelas kerawanan sedang hingga sangat rendah berada di wilayah hulu DAS meliputi Kecamatan Uluere, Tompo Bulu dan Sinoa. Nilai AUC validasi 1 dan validasi 2 masing-masing 0,901 dan 0,894. Berdasarkan pola ruang, Kecamatan Gantarang Keke didominasi oleh kawasan hortikultura, Kecamatan Pajukukang didominasi oleh kawasan industri, serta Kecamatan Bantaeng, Bisappu dan Eremerasa didominasi oleh kawasan tanaman pangan. Strategi dalam pengelolaan sumber daya lahan dan air dalam kaitannya dengan terjadinya banjir di Kabupaten Bantaeng terdiri atas struktural dan non-struktural, sedangkan arahan kebijakan yang disarankan dalam penanggulangan dan pengendalian banjir antara lain sinkronisasi dan integrasi seluruh stakeholder yang berkepentingan, perumusan dalam pemanfaatan ruang melalui RTRW berbasis DAS, pembangunan infrastruktur, sosialisasi ke masyarakat mengenai tata kelola lahan yang lebih konservatif dan pembuatan sarana/prasarana peringatan dini melalui flood warning system.

## **b. Latar Belakang**

Bencana yang terjadi membawa sebuah konsekuensi untuk mempengaruhi manusia dan/atau lingkungannya. Kerentanan terhadap bencana dapat disebabkan oleh kurangnya manajemen bencana yang tepat, dampak lingkungan, atau manusia sendiri. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kapasitas ketahanan komunitas terhadap bencana.

Kawasan Asia berada di urutan teratas dari daftar korban akibat bencana alam. Hampir setengah bencana di dunia terjadi di Asia membuat wilayah ini rawan bencana. Laporan dari ESCAP juga merinci daftar negara di kawasan Asia Pasifik mengalami bencana alam selama periode tahun 1980-2009.

Sebagai contoh, Indonesia menempati peringkat kedua dalam daftar jumlah kematian, di negara ini juga telah menyebabkan kerugian ekonomi paling sedikit US\$ 22,5 miliar. Data ini terdapat dalam The Asia Pacific Disaster Report 2010 yang disusun oleh The Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP) dan The UN International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). Ini adalah pertama kalinya PBB menyiapkan laporan khusus tentang bencana alam di kawasan Asia-Pasifik yang dipublikasikan pada tanggal 26 Oktober 2010.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang rentan akibat berbagai bencana alam, terutama banjir. Banjir sudah biasa melanda Indonesia, terutama pada musim hujan. Hal ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk pada kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan.

Banjir disebabkan oleh dua kategori yaitu banjir akibat alami dan banjir akibat aktivitas manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan

lingkungan, seperti perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan permukiman di sekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistem kontrol banjir yang kurang/tidak tepat.

Risiko banjir tidak dapat dihindari sepenuhnya sehingga harus dikelola. Manajemen bencana banjir memang tidak berusaha untuk menghilangkan bahaya banjir tetapi untuk menanggulangnya. Risiko banjir tergantung pada komponen yang terdiri dari bahaya dan kerentanan. Kombinasi faktor alam dan manusia menciptakan risiko banjir. Keberhasilan manajemen risiko banjir diperoleh jika langkah-langkah struktural dan non-struktural dilaksanakan. Pencegahan dan mitigasi banjir mencakup tindakan pengendalian banjir secara struktural, seperti pembangunan bendungan atau tanggul sungai dan tindakan non-struktural seperti prediksi dan peringatan banjir, manajemen risiko banjir, partisipasi komunitas/masyarakat, penataan institusional, dan sebagainya.

Pada tahun 2020 akibat curah hujan yang tinggi di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebabkan banjir di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, salah satunya Bantaeng. Salah satu penyebab banjir di Kabupaten Bantaeng adalah meluapnya Sungai Calendu sehingga mengakibatkan tujuh kelurahan di terjang banjir. Selain akibat meluapnya Sungai Calendu banjir juga diperparah dengan jebolnya Cekdam Balang Sikuyu dikarenakan tidak mampu menampung debit air yang terlalu tinggi. Drainase perkotaan yang bermasalah dan juga banyaknya sungai yang bermuara di sekitar kawasan perkotaan Kabupaten Bantaeng menyebabkan banjir di kawasan perkotaan semakin parah.

Kondisi topografi kawasan perkotaan Kabupaten Bantaeng yang membentang di sepanjang pesisir menyebabkan kawasan ini perkotaannya sangat rentan terhadap banjir. Kerentanan ini semakin bertambah dengan banyaknya sungai yang membelah kawasan pesisir mulai dari Kecamatan Bissapu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Pa'jukukang hingga ke pantai marina perbatasan Kabupaten Bantaeng. Banyaknya sungai ini berimplikasi menambah beban air buangan drainase ketika terjadi hujan bersamaan dengan pasang tertinggi air laut. Kondisi dan karakteristik Kabupaten Bantaeng inilah yang menyebabkan daerah ini memiliki potensi dan kerawanan banjir yang tinggi sehingga diperlukan sebuah kajian menyeluruh baik dari segi kewilayahan, Infrastruktur maupun mitigasi bencana dalam mengurangi dampak dari kejadian banjir yang akan menimpa Kabupaten Bantaeng.

### **c. Rekomendasi**

Arahan kebijakan dalam penanggulangan dan pengendalian banjir di Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dalam hal penanganan banjir dengan seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam penanggulangan dan pengendalian banjir dalam bentuk sinkronisasi dan integrasi perencanaan.
- 2) Perumusan dalam pemanfaatan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat berlandaskan pada landscap alam atau berbasis

DAS, sehingga pembangunan ruang di Kabupaten Bulukumba dapat diminimalisir dampak ekologis yang ditimbulkan.

- 3) Pembangunan infrastruktur penanggulangan dan pengendalian banjir dapat direalisasikan baik struktur dan non-struktur melakukan kebijakan strategis.
- 4) Sosialisasi masyarakat mengenai tata kelola lahan yang lebih konservasi sehingga meminimalisir besarnya tanah erosi, sedimentasi dan debit sungai sehingga dampak banjir tidak besar.
- 5) Pembuatan sarana dan prasarana peringatan dini melalui flood warning system.

## **XV. Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bulukumba**

### **a. Abstrak**

Badan nasional penanggulangan bencana menyebutkan terdapat 1.288 kejadian banjir atau 42,1% yang terjadi sepanjang tahun 2021. Menurut World Resources Institute (2019) ada 3 faktor utama terjadinya banjir di Indonesia, yaitu berkurangnya tutupan lahan/hutan, cuaca ekstrim, dan kondisi topografi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang beragam. Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi dengan daerah dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Dengan kondisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba yang berada di ujung Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi di Sulawesi Selatan. Dengan begitu Kabupaten Bulukumba menjadi kabupaten strategis destinasi pariwisata utama di Sulawesi Selatan. Didukung dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Selain itu terdapat permasalahan yang dapat mengganggu jalan perekonomian kabupaten. Kota Bulukumba merupakan Ibukota Kabupaten Bulukumba, dimana setiap tahunnya selalu terlanda bencana banjir, terutama di kawasan pusat kota lama dan pada area-area lain yang mempunyai drainase yang buruk. Pada kajian kali ini, difokuskan pada analisis kerawanan banjir dengan hasil tingkat kerawanan sangat tinggi (luas 1,61% dari wilayah kajian) dan tinggi (6,45% dari wilayah kajian) yang terkonsentrasi pada wilayah hilir DAS dengan kelurahan yang meliputi Kelurahan Caile, Ela-Ela, Kalumeme, Dannuang, dan sebagian besar meliputi pada wilayah Kecamatan Ujung Loe. Hasil validasi menunjukkan nilai dengan akurat tinggi (0,89 pada tingkat kesuksesan AUC dan 0,88 pada tingkat prediksi AUC) dengan faktor dengan nilai tertinggi pada probabilitas terjadinya banjir adalah penutupan lahan tambak, sawah dan hamparan pasir pantai, tekstur tanah berpasir dan jarak sungai. Untuk arah kebijakan telah dirumuskan yaitu Strategi pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, Penyelenggaraan Kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan pemukiman, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menerapkan mekanisme tanggap darurat Banjir secara terkoordinir, terpadu dengan melibatkan multipihak serta Menjamin

pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terkena bencana (terutama pengungsi) berdasarkan standar minimal bantuan sesuai peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan.

## **b. Latar Belakang**

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga air melimpah dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah. Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi terdampak bencana banjir terbesar ke-6 di dunia yakni sekitar 640.000 orang setiap tahunnya. Badan nasional penanggulangan bencana menyebutkan terdapat 1.288 kejadian banjir atau 42,1% yang terjadi sepanjang tahun 2021 (BNPB, 2021).

Persoalan banjir tidak hanya di tinjau dari persoalan curah hujan, tetapi persoalan yang kompleks melibatkan seluruh aspek, baik aspek sosial ekonomi budaya, maupun aspek geomorfologi lahan yang mempengaruhi bentang alam pada suatu wilayah. Menurut World Resources Institute (2019) ada 3 faktor utama terjadinya banjir di Indonesia, yaitu berkurangnya tutupan lahan/hutan, cuaca ekstrim, dan kondisi topografi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang beragam. Perubahan iklim juga sangat berperan terhadap fenomena iklim yang terjadi di Indonesia seperti siklon tropis dan fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) sehingga beberapa strategi penanganan banjir di suatu daerah tidak berjalan dengan maksimal. Faktor aktivitas penduduk berpengaruh terhadap keadaan banjir, penimbunan daerah rawa atau situ, menyempitnya alur sungai akibat adanya pemukiman di sepanjang sempadan sungai semakin memperparah kejadian banjir yang akan terjadi. Bencana banjir tidak hanya berdampak fisik saja terhadap daerah atau wilayah yang terdampak banjir tetapi berdampak juga terhadap sosial ekonomi wilayah. Kerugian ekonomi dan sosial tentunya berdampak langsung terhadap masyarakat baik dari segi pola tingkah laku bermasyarakat maupun dari segi mata pencarian masyarakat yang terdampak banjir.

Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan salah satu tujuan wisata utama di Provinsi Sulawesi Selatan dan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, serta merupakan salah satu kabupaten yang strategis pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba dengan luas 1.154,58 km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km. Kota Bulukumba merupakan Ibukota Kabupaten Bulukumba, dimana setiap tahunnya selalu terlanda bencana banjir, terutama di kawasan pusat kota lama dan pada area-area lain yang mempunyai drainase yang buruk.

Kondisi topografi Kabupaten Bulukumba merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang

dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Rilau Ale. Kondisi tersebut berdampak pada dinamika geohidrolika sungai-sungai yang berada di Kabupaten Bulukumba ini dan mempunyai potensi daya rusak air yang cukup tinggi. Sungai-sungai dengan kondisi alam seperti tersebut di atas rawan terhadap bencana alam, antara lain berupa longsoran tebing sungai hingga meluapnya air ke wilayah permukiman ataupun wilayah yang cukup tinggi aktifitas manusianya.

Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan kawasan perkotaan Bulukumba merupakan daerah dengan kontur bervariasi dan terletak di area pesisir. Dimana terdapat beberapa sungai yang bermuara di Kota Bulukumba, Hal ini sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir ditambah lagi oleh system drainase yang buruk. Limpasan air dari kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Rilau Ale, menambah volume air yang mengalir masuk ke Kota Bulukumba yang merupakan muara dari beberapa sungai dan saluran irigasi. Permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Bulukumba juga menjadi salah satu faktor kejadian banjir. Masyarakat yang kurang mementingkan lingkungan berimbas pada tingkat kerawanan banjir pada wilayah tersebut.

Bencana banjir dapat ditanggulangi secara komprehensif melalui pendekatan pengurangan risiko bencana (PRB). Penanggulangan bencana (PB) melalui pendekatan PRB mempertimbangkan tiga komponen, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Upaya mengurangi risiko bencana berarti upaya mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan/atau meningkatkan kapasitas. Pendekatan ini tentunya di tunjang pada sinergitas antara semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bulukumba sehingga terciptanya kebijakan yang bersifat komprehensif berkesinambungan dan efektif karena melihat bagaimana Kabupaten Bulukumba menjadi kawasan strategis Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan studi komprehensif terkait DAS, penanggulangan, dan pengendalian banjir secara komprehensif yaitu antara lain melakukan identifikasi daerahdarah yang berpotensi terjadinya banjir berbasis DAS beserta penyebab terjadinya bencana, pola pemanfaatan sumber daya alam yang bersangkutan, kegiatan pengendalian bencana yang telah dan sedang diusahakan hingga penetapan pola pengendalian bencana dan penetapan infrastruktur pokok penunjang mitigasi bencana yang dibutuhkan serta terciptanya kebijakan yang bersifat komprehensif berkesinambungan dan efektif. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya memitigasi bencana banjir di Kabupaten Bulukumba sebagai bentuk manajemen pengelolaan sungai atau kawasan yang integral adalah melalui kegiatan "Kajian Penanggulangan Dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bulukumba (Kajian Penanganan DAS di Provinsi Sulawesi Selatan).

### **c. Rekomendasi**

- 1) Strategi pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- 2) Penyelenggaraan Kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan pemukiman, ekonomi dan pelestarian lingkungan.
- 3) Menerapkan mekanisme tanggap darurat Banjir secara terkoordinir, terpadu dengan pelibatan multipihak
- 4) Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terkena bencana (terutama pengungsi) berdasarkan standar minimal bantuan sesuai peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan

## **XVI. Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Sinjai**

### **a. Abstrak**

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang masuk kedalam isu banjir yang disebabkan karena diapit oleh dua sungai yang cukup besar yang memiliki lahan kritis yaitu Sungai Sinjai dan Tangka. Dalam 10 tahun banjir terparah yang pernah terjadi pada tanggal 8 Juli 2021 setinggi 1 – 3 m. Salah satu upaya dalam memitigasi bencana banjir di Kabupaten Sinjai adalah melalui kegiatan Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Sinjai. Kajian ini bertujuan merumuskan strategi dan kebijakan dalam penanggulangan dan pengendalian kawasan banjir di Kabupaten Sinjai. Permasalahan ini diselesaikan dengan cara melakukan survey kondisi lokasi, analisis tingkat bahaya erosi, analisis hidrologi, hidrolika dan perencanaan penanggulangan dan pengendalian banjir. Hasil dari penelitian ini diperoleh strategi penanggulangan banjir yaitu:

- (1) arahan konservasi lahan secara vegetatif dengan menanam tanaman keras pada tingkat bahaya erosi sedang, berat dan sangat berat dan mekanik dengan pemeliharaan Bangunan Pengendali Sedimen Mangottong,
  - (2) 14 Desa dari 4 Kecamatan di Kabupaten Sinjai yang termasuk dalam daerah rawan banjir,
  - (3) 7 titik pantau sistem peringatan dini banjir, dan
  - (4) 8 rekomendasi titik evakuasi banjir terdekat,
- sedangkan untuk strategi pengendalian banjir yaitu
- (1) Normalisasi pada Sungai Tangka dan Sungai Sinjai,
  - (2) rencana tanggul banjir pada Sungai Sinjai dan
  - (3) kolam retensi Sungai Sinjai seluas 17,80 Ha dan Sungai Cakkempong seluas 4,38 Ha. Mitigasi yang diusulkan dapat mereduksi area genangan sebesar 407,12 Ha atau sekitar 32,40%.

### **b. Latar Belakang**

Permasalahan banjir merupakan salah satu masalah klasik yang sering melanda Indonesia, khususnya di kawasan kota yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis dan di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan data kejadian banjir di Indonesia adalah yang terbanyak yaitu 1.794 dari total 5.402 kejadian bencana yang tercatat tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Dampak dari kejadian bencana tersebut telah mengakibatkan 7.630.692 jiwa menderita dan mengungsi, 738 meninggal dunia, 87 jiwa hilang dan 14.915 luka-luka. Selain mengakibatkan korban jiwa, kejadian bencana yang terjadi tahun 2021 juga menyebabkan 158.658 rumah dan 4.445 fasilitas rusak (BNPB, 2021).

Berbagai kerusakan dan kehilangan tersebut akan menyebabkan angka kemiskinan di suatu wilayah yang terkena banjir akan meningkat. Oleh karena itu, penanggulangan banjir tidak hanya bersifat reaktif atau melakukan penanggulangan setelah terjadi banjir. Tetapi penanggulangan banjir juga bisa bersifat antisipatif, yakni melakukan pengkajian dan tindakan pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya banjir (PNPM-MP, 2018). Karena bencana banjir merupakan sesuatu yang bisa diprediksi waktu dan tempat kejadiannya. Hal tersebut didukung dengan adanya kemajuan teknologi saat ini yang telah mengarah pada upaya-upaya penanganan prabencana banjir dengan melihat data kejadian sebelumnya. Selain itu, upaya peringatan dini menjadi hal yang sangat vital untuk mengurangi dampak risiko akibat banjir yang dapat terjadi sewaktu-waktu (Suprpto, 2011).

Banjir adalah proses alami yang dapat menjadi bencana ketika dataran banjir dan area tangkapan (catchment area) telah ditempati dan dibangun oleh manusia. Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka sumber daya alam telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan meningkatnya kejadian risiko banjir pada suatu tempat. Kawasan hulu yang dulunya berhutan lebat telah berubah fungsi menjadi lahan pertanian dan perumahan, dan ini dengan sendirinya telah mengurangi luasnya fungsi daerah tangkapan air. Di sisi lain, lahan kosong tanpa vegetasi dapat menyebabkan risiko erosi dan kerusakan. Kondisi ini dengan sendirinya akan meningkatkan kecepatan aliran air dan mengarah ke gerusan daratan dan tanah longsor.

Kabupaten Sinjai secara geografis terdiri atas wilayah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 0–2.871 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Wilayahnya termasuk 9 pulau-pulau kecil di Teluk bone yang masuk ke wilayah kecamatan Pulau Sembilan. Pesisir di Kabupaten Sinjai berada di sepanjang batas sebelah timur dan tergolong sempit meliputi Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Utara dan kecamatan Tellu Limpoe. Selanjutnya daerah dataran tinggi yang merupakan lereng timur Gunung Lompobattang–Gunung Bawakaraeng meliputi kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Borong. Serta dataran tinggi Pegunungan Bohonglangi meliputi sebagian wilayah kecamatan Bulupoddo, kondisi tersebut berdampak pada dinamika geohidrolika sungai- sungai yang berada di Kabupaten Sinjai ini dan mempunyai potensi daya rusak air yang cukup tinggi. Sungai-sungai dengan kondisi alam seperti tersebut di atas rawan terhadap bencana alam, antara lain berupa longsor tebing sungai hingga meluapnya air ke wilayah permukiman ataupun wilayah yang cukup tinggi aktifitas manusianya.

Banjir di Kabupaten Sinjai beberapa waktu yang lalu disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang bersamaan dengan air pasang akibatnya

wilayah terdampak bencana tersebut meliputi Kelurahan Biringere, Kelurahan Balangnipa, Kelurahan Bongki dan Kelurahan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara, kemudian Desa Panaikang di Kecamatan Sinjai Utara, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir semua kawasan Perkotaan Sinjai terlanda banjir. Salah satu faktor yang membuat kawasan Perkotaan Sinjai termasuk kategori rawan banjir karena diapit oleh dua sungai yang cukup besar yakni di bagian Selatan terdapat Sungai Sinjai dan bagian Utara terdapat Sungai Tangka.

Hal ini sesuai dengan KEPMEN PUPR No. 89/KPTS/M/2018 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jeneberang menyebutkan bahwa Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang masuk kedalam isu banjir yang disebabkan oleh Sungai Sinjai dan Sungai Tangka. Selain itu DAS Tangka tercatat memiliki lahan kritis seluas 20.498,04 Ha dan DAS Sinjai seluas 6.495,42 Ha. Sehingga dalam pengendalian daya rusak air, DAS Tangka dan DAS Sinjai termasuk DAS yang perlu diprioritaskan dalam upaya pengendalian banjir.

Bencana banjir dapat ditanggulangi secara komprehensif melalui pendekatan pengurangan risiko bencana (PRB). Penanggulangan bencana (PB) melalui pendekatan PRB mempertimbangkan tiga komponen, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Upaya mengurangi risiko bencana berarti upaya mengurangi ancaman mengurangi kerentanan, dan/atau meningkatkan kapasitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan studi komprehensif penanggulangan dan pengendalian banjir yaitu melakukan identifikasi daerah-daerah yang berpotensi terjadinya banjir beserta penyebab terjadinya bencana, pola pemanfaatan sumber daya alam yang bersangkutan, kegiatan pengendalian bencana yang telah dan sedang diusahakan hingga penetapan pola pengendalian bencana dan penetapan infrastruktur pokok penunjang mitigasi bencana yang dibutuhkan. Salah satu upaya Pemerintah dalam upaya dalam memitigasi bencana banjir di Kabupaten Sinjai sebagai bentuk manajemen pengelolaan sungai atau kawasan yang integral adalah melalui kegiatan Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kota Sinjai Kabupaten Sinjai .

### **c. Rekomendasi**

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Banjir di Kabupaten Sinjai, yaitu:

- 1) Rekomendasi untuk Balai Besar Wilayah Sungai Pompengen Jeneberang (BBWS-PJ) berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan yaitu melakukan kajian detail perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen Sungai Tangka, memperhatikan Operasi dan pemeliharaan Bangunan Pengendali Sedimen Sungai Sinjai, Normalisasi Sungai Sungai Tangka & Sinjai, pembuatan tanggul banjir pada titik kritis Sungai Sinjai, pembangunan kolam retensi pada Sungai Sinjai, dan kajian detail terhadap usulan perencanaan bangunan – bangunan air yang berada di wilayah sungai tersebut.
- 2) Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan yaitu melakukan pengalokasian APBD untuk kajian detail dan pembangunan Kolam Retensi di Sungai

Cakkempong serta kajian penggunaan pintu pengatur banjir dan pompa di setiap Drainase Primer/anak sungai untuk mengantisipasi masuknya pasang yang merupakan salah satu masalah utama di Sungai Sinjai dan Tangka

- 3) Rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Sinjai berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan yaitu melakukan normalisasi pada drainase primer/anak Sungai Sinjai & Tangka yang melitasi wilayah perkotaan Kabupaten Sinjai untuk meningkatkan kapastias tampung dari drainase tersebut. Selain itu, perlu dilakukan kajian terkait mikrodrainase untuk mengetahui permasalahan pada jaringan drainase di Kabupaten Sinjai.
- 4) Rekomendasi untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Sinjai berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terkait sistem peringatan dini banjir pada instansi lain dan terutama pada masyarakat di daerah terdampak banjir untuk selanjutnya dilakukan simulasi untuk menciptakan kesiapsiagaan seluruh instansi terkait dan masyarakat dalam menghadapi potensi bahaya banjir yang bisa datang sewaktu-waktu. Sesuai dengan prinsipnya bahwa sistem peringatan dini harus dapat dipertanggungjawabkan, maka pada tingkat masyarakat harus dibentuk Kelompok Peringatan Dini dibawah pembinaan pemerintah daerah setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertanggung jawab untuk melakukan proses pemantauan gejala alam, analisis serta mengeluarkan peringatan dini dan pelaporan. Kelompok Peringatan Dini ini terdiri dari empat tim, yaitu Tim Pemantau, Tim Analisis, Tim Diseminasi dan Tim Pelaporan.
- 5) Rekomendasi untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kab. Sinjai berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan yaitu melakukan konservasi secara vegetatif diprioritaskan pada lokasi yang kritis dan sangat kritis pada masing-masing fungsi kawasan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut. Penanganan vegetatif yang dilakukan yaitu dengan menanam tanaman keras seperti pohon pinus, jati dan mahoni pada tingkat bahaya erosi sedang, berat dan sangat berat. Dalam hal ini tata guna lahan yang bisa dirubah atau dilakukan penghutanan adalah pada lahan perkebunan/tegalan/semak belukar.

## **XVII. Hak Kekayaan Intelektual Produk Kopi Latimojong Luwu (HAKI)**

### **a. Abstrak**

Kopi arabika Latimojong adalah produk kopi yang dihasilkan masyarakat yang berdiam di desa Tibussan, Lambanan, Buntu Sarek, Pajang, Ulusalu, Boneposi dan Tolajuk di lereng sebelah timur Gunung Latimojong di ketinggian antara 1000 - 1600 m dpl. Curah hujan di kecamatan latimojong mengalami bulan kering (BK) pada rentang 1-2 bulan, sedangkan untuk bulan basah (BB) terjadi selama 8 bulan. Sehingga dapat dikategorikan iklim kabupaten luwu di wilayah IG masuk dalam Tipe B2 berdasakan klasifikasi Oldeman(1977). Kopi Latimojong beraroma gula aren, buah buahan dan rempah serta sweetnes yang tinggi dengan bodi medium. Terdapat biji kopi yang berasal dari kunyahan hewan kuskus (*Aliurops ursinus*) dan tikus hutan (*Apodemus sylvaticus*) serta hewan pengerat lain. Pengumpulan biji kopi yang

berasal dari hewan tersebut dinamakan “mabisang” dan hasilnya disebut kopi Bisang. Luas lahan 2.624 Ha dengan total produksi 1.297 Ton/Ha. Pada daerah Tibussan dan Tolajuk kandungan Fe tanah nilainya diatas 85 % m/m yang mengindikasikan lahan sangat potensial untuk perkebunan kopi

## **b. Latar Belakang**

Pegunungan Latimojong dengan puncak tertingginya mencapai lebih 3.478 Mdpl, terletak di Kabupaten Luwu, Enrekang dan Tana Toraja tidak hanya menjadi atap Sulawesi, namun menyimpan potensi geografis yang sangat tinggi dan mendukung wilayah ini menjadi kawasan agroekowisata yang dapat memberi nilai tambah bagi masyarakatnya. Komoditas perkebunan yang dihasilkan di wilayah eksklusif Latimojong adalah Kopi Toraja dan Kopi Kalosi. Kedua produk kopi ini berkelas spesialti dan menjadi salah satu produk kopi terbaik di dunia. Kopi Arabika Kalosi Enrekang dan Kopi Arabika Toraja telah berhasil mendapatkan Sertifikat Hak Indikasi Geografis dari Kemenkum HAM RI. Hal ini bermakna bahwa pemerintah telah mengakui akan keunikan produknya yang tidak akan diperoleh dari tempat lain dimana karakteristik spesifik mutunya dihasilkan karena interaksi faktor alam dan manusia pada daerah tersebut. Selain itu negara juga melindungi masyarakat penghasil produk tersebut dari tindak perdagangan curang dan tidak adil. Di lereng sebelah Timur Pegunungan Latimojong terletak Kecamatan Latimojong kabupaten Luwu, wilayah yang menghasilkan komoditas unggulan lokal kopi yang produknya sudah banyak terjual baik pada pasar lokal, regional dan bahkan internasional. Produk kopi ini dikenal sebagai Kopi Arabika Latimojong.

Kopi Arabika Latimojong mempunyai karakteristik yang khas dengan aroma dan citarasa unik sebagai hasil interaksi antara varietas kopi yang ditanam, lingkungan geografis, kondisi faktor alam dan keterampilan masyarakatnya. Salah satu produk kopi arabika unik dan langka dan belum banyak dikenal orang dari wilayah Latimojong adalah kopi Bisang. Kopi Bisang diperoleh dari buah kopi yang dikonsumsi oleh hewan Kuskus Sulawesi (*Aliurops ursinus*) yang masih banyak terdapat di hutan lindung pegunungan Latimojong pada ketinggian diatas 1000 m dpl. Kegiatan pengumpulan biji oleh masyarakat dari buah kopi yang telah makan oleh Kuskus dan hewan pengerat hutan lainnya disebut sebagai Ma'bisang. Sehingga produk kopinya disebut sebagai Kopi Bisang. Hewan Kuskus mirip dengan Luwak (*Paradoxurus hermaphroditus*) namun ukuran tubuhnya sedikit lebih kecil. Hal yang paling mendasar membedakan kedua produk tersebut adalah kopi Luwak berasal dari kotoran hewan sedangkan Kopi Bisang berasal dari proses pengunyahan buah yang kemudian dikeluarkan melalui mulut atau dimuntahkan. Kemudian biji kopi tersebut dikumpulkan dan diolah untuk dapat menjadi minuman. Mulai dari dicuci, disangrai, hingga dihaluskan menjadi bubuk. Kuskus mampu membedakan antara buah kopi yang masih alami dan telah tercampur dengan pestisida.

Industri lokal masyarakat Luwu yang unik dan bernilai tinggi ini jika tidak mempunyai payung perlindungan hukum akan merapuhkan nilai tawar masyarakatnya dan mengakibatkan investor dan pelaku bisnis serta para penakar keuntungan sepihak leluasa mengambil dan mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam mereka. Jika hal ini terjadi maka pendapatan asli masyarakat

akan rendah yang selanjutnya proses pemiskinan masyarakat lokal khususnya yang berdiam di pinggiran hutan menjadi kenyataan yang tak dapat dihindari.

Untuk menjadikan lembaga masyarakat kabupaten Luwu menjadi kuat dan mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perdagangan komoditas unggul lokal yang mereka punyai dari tindak perdagangan curang serta tidak adil dan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat diperlukan pendekatan *community-based* yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan atas penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Hak Indikasi Geografis (IG) yaitu kepemilikan dan kedaulatan pengelolaan sumberdaya alam spesifik yang bernilai ekonomi penting dan bereputasi tidak boleh dikuasai oleh pribadi atau perusahaan tertentu tapi dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat lokal. Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan nama indikasi geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk. Dengan alternatif baru hak indikasi geografis bagi kepemilikan pengelolaan berbasis masyarakat ini maka pemanfaatan sumberdaya alam di Luwu akan lebih dikuatkan secara hukum untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah setempat mengatur tata niaga industri perkopian untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Luwu. Indikasi geografis berbeda dengan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti merek, patent, hak cipta, ataupun varietas tanaman yang haknya dimiliki secara individual.

Indikasi geografis tidak demikian, hak tersebut secara kolektif dimiliki oleh masyarakat produsen setempat. Tiap orang yang yang berada dalam daerah penghasil produk dimungkinkan untuk memiliki hak tersebut dan menggunakan nama indikasi geografis pada produksinya sepanjang syarat-syarat dalam buku persyaratan yang telah disepakati bisa dipenuhi. Indikasi geografis pada prakteknya dikenali oleh konsumen sebagai tanda tempat asal suatu barang dimana ciri khas dan kualitas diketahui berbeda dengan barang serupa yang berasal dari daerah lain, konsumen biasanya lebih tertarik dan rela membayar di atas harga normal karena originalitasnya, kualitas dan reputasi yang melekat pada barang tersebut. Konsumen mengenali kualitas keaslian dan menikmati reputasi premium sehingga mereka rela membayar mahal untuk itu, konsumen terhindar dari kekhawatiran terperdaya dengan produk lain saat mereka membeli produk indikasi geografis karena indikasi geografis bekerja melindungi produk tersebut dari upaya curang pihak lain yang membuat imitasinya. Disisi lain, indikasi geografis secara hukum memaksa produsen untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk sesuai dengan buku persyaratan, sehingga konsumen bisa menikmati produk dengan mutu yang sama dari waktu ke waktu, konsumen juga memiliki akses informasi untuk bisa melacak keberadaan daerah asal penghasil barang tersebut (Septiono, 2009).

### **c. Rekomendasi**

- 1) Dengan Tersedianya dokumen deskripsi Hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Latimojong Luwu maka sudah dapat di selesaikan sampai pada tahap penerimaan piagam penghargaan hak indikasi geografis Kopi Arabika Latimojong Luwu dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

(Dirjen KI Kemenkum HAM RI) agar Kopi Arabika Latimojong Luwu dapat diakui dan dilindungi dari perdagangan curang.

- 2) Dengan Adanya dokumen deskripsi Hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Latimojong Luwu pemerintah daerah sudah dapat mendorong terciptanya industry kopi arabika Latimojong Luwu yang bermutu, berkualitas, dan berdaya saing..

## **XVIII. PROTOTYPE ALAT/MESIN ROASTING KOPI (SW-I / Mandiri)**

### **a. Abstrak**

Teknik penyangraian biji kopi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas bubuk kopi selain faktor bahan baku. Teknik penyangraian meliputi keterampilan operator, pencampuran biji kopi dalam silinder/tromol, temperatur udara dalam silinder penyangraian, sumber pemanas yang digunakan, dan aktivitas setelah penyangraian. Riset ini bertujuan untuk membuat prototype alat/ mesin roasting kopi dengan silinder stainless steel dan perekayasaan silinder/tromol menggunakan tanah liat dan melakukan ujicoba alat. Metode yang digunakan adalah dengan membuat mesin sangrai dengan silinder berbahan tanah liat dan pengaduknya dari tanah liat melekat pada dinding silinder berbentuk spiral. Di bagian atas silinder dilengkapi dengan penutup dan cerobong asap. Sumber panas dari kompor elpiji. Hasil desain dan rancang bangun mesin sangrai biji kopi dengan dimensi panjang 125 cm, lebar 47 cm dan tinggi 160 cm dengan kapasitas silinder tanah liat  $\pm$  3kg. Komponen mesin sangrai adalah beam, cylinder, mixer, side cover cylinder, inlet, outlet, top cover cylinder, anvil of stove dan gearbox. Hipotesis atau asumsi pengujian menunjukkan bahwa pengujian mesin roasting kopi tromol tanah liat menunjukkan keberhasilan dari sisi desain/rancang bangun dan dapat diteliti lebih lanjut biji kopi sangrai yang dihasilkan memiliki aroma dan cita rasa yang lebih berkualitas dibandingkan menggunakan silinder plat logam stainless steel.

### **b. Latar Belakang**

Kopi adalah jenis minuman yang penting bagi sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Bukan hanya karena kenikmatan konsumen peminum kopi namun juga karena nilai ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi dan mengekspor biji kopi seperti Indonesia. Selain selektifitas dalam pemilihan biji kopi, proses sangrai kopi yang baik dan benar juga berpengaruh terhadap kualitas secangkir kopi. Menurut ahli, lebih kurang 70% dari kualitas kopi ditentukan dari teknik proses penyangraian biji kopi itu sendiri baik melalui alat/mesin roasting kopi yang modern berteknologi tinggi maupun yang secara sederhana tradisional.

Minuman kopi merupakan salah satu jenis minuman yang memiliki citarasa sangat khas. Dengan citarasanya yang khas ditambah adanya pengaruh fisiologis kesegaran setelah minum menyebabkan kopi banyak diminati oleh konsumen di seluruh dunia (Anonim, 2008a).

Berdasarkan fakta ini menunjukkan bahwa dari tahun ketahun alat/mesin roasting kopi semakin modern dan berteknologi tinggi dan mahal sehingga untuk alat sangrai kopi yang masih tradisional dan sederhana

tersingkirkan dan tidak laku dipasaran. Berangkat dari kondisi ini periset/perekayasa mencoba menggali dan mengangkat kembali kearifan lokal daerah dimana historis perkopian di dunia sudah sangat terkenal secara turun temurun, yang perkembangannya dimulai sejak zaman nenek moyang atau leluhur kita terdahulu secara tradisional dan sederhana menggunakan gerabah, tembikar berbahan baku tanah liat untuk penggorengan atau roasting biji kopi dengan menggunakan kayu bakar yang hasilnya sangat memiliki aroma dan citarasa alami dan memiliki kekhasan zaman dulu.

Tanah liat adalah bahan yang biasanya digunakan untuk membuat batu bata sebagai material bangunan hingga digunakan dalam kerajinan gerabah. Misalnya untuk membuat guci, piring, tembikar, patung, dan sebagainya. Tanah liat ini berbeda dengan tanah-tanah pada umumnya. Oleh karena itu, tanah ini pun bisa difungsikan sebagai bahan pembuat material bangunan hingga kerajinan. Bahkan di Indonesia sendiri, keberadaan tanah liat ini bukan hal yang sulit untuk ditemukan. Sehingga bisa dilihat, ada banyak sekali orang-orang yang menjual batu-bata, keramik, tembikar, gerabah, kuali dan atap genteng di berbagai daerah.

Penyangraian (*roasting*) bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup. Penyangraian secara tradisional umumnya dilakukan secara terbuka dengan menggunakan wajan terbuat dari tanah liat (kuali). Penyangraian kopi secara tertutup dengan menggunakan mesin-mesin yang harganya cukup mahal seperti batch roaster, sehingga sering tidak terjangkau oleh industri kecil yang modalnya terbatas (Anonim, 2008d).

Ada tiga level roasting kopi, yaitu:

1. *Light Roast*, suhu 180-205 °C, biji dipanggang tepat hingga terjadi letupan pertama. Warnanya coklat kekuningan. Kopi yang diroasting pada suhu ini memiliki keasaman dan *caffeine* yang tinggi.
2. *Medium Roast*, suhu 210-220 °C, biji dipanggang melewati letupan pertama namun tidak sampai pada letupan kedua. Warnanya coklat gelap. Kopi yang diroasting pada suhu ini memiliki Keasaman yang seimbang dan *caffeine* yang lebih rendah.
3. *Dark Roast*, suhu 225°C keatas, biji dipanggang hingga letupan pertama kedua. Warnanya coklat gelap dengan minyak dipermukaan. Kopi yang diroasting pada suhu ini memiliki kekentalan rasa yang tebal.

Adapun riset prototype alat/mesin roasting kopi yang dilakukan adalah melaksanakan desain dan rancang bangun alat roasting biji kopi skala Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan kapasitas 3 Kg sekali proses (batch) menggunakan plat stainless steel 304 sebagai silinder atau tromol yang berfungsi sebagai ruang sangrai kopi.

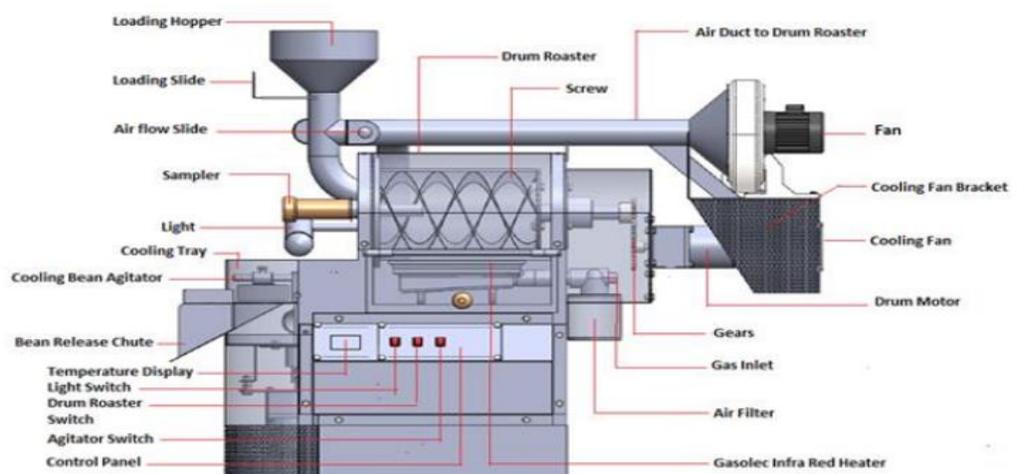
Melihat kondisi perkembangan alat/mesin roasting saat ini Tim Perekayasa mencoba melakukan terobosan baru memadukan unsur modern dan tradisional agar kearifan lokal daerah tetap terjaga yakni melaksanakan desain dan rancang bangun prototype alat mesin roasting biji kopi menggunakan Tromol/silinder Stainless Steel dan Tromol yang berbahan baku tanah liat. Tanah liat adalah deposit yang mempunyai partikel berukuran lebih kecil atau sama dengan 0,002 mm dalam jumlah lebih dari

50 %, sangat keras dalam kondisi kering dan bersifat plastis pada kadar air sedang.



Gambar 1. Contoh Mesin Roasting Kopi bahan logam stainless steel

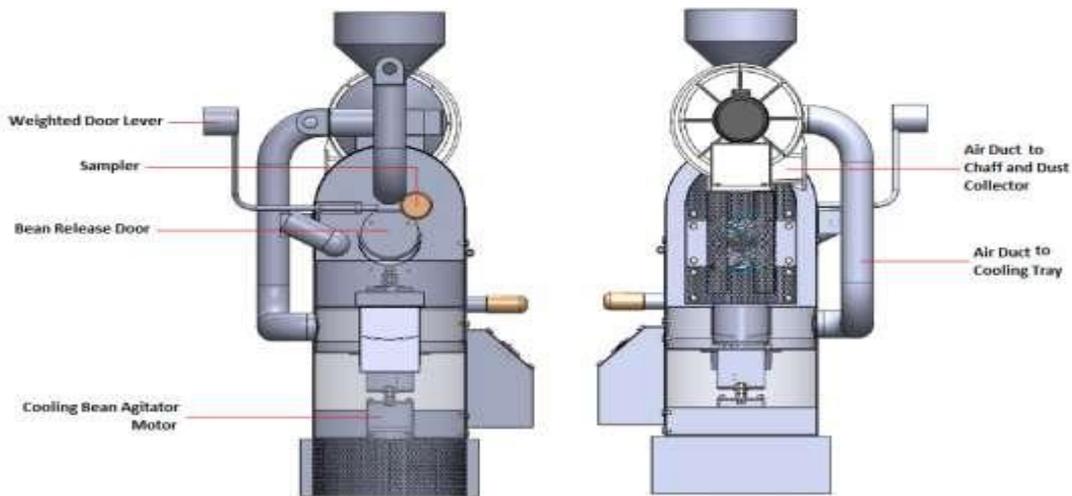
Prinsip dasar agar kopi keluar warna dan cita rasa khas pada kopi tersebut dengan mengurangi kadar air yang semula 12% sampai 4% untuk tingkatan roasted beans yang dark, proses tersebut bisa di dapat dengan metode lain, hot air roaster adalah metode untuk menyangrai kopi dengan memanfaatkan aliran udara panas yang di sirkulasikan ke tabung silinder mesin sangrai kopi, metode tersebut diharapkan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, agar kekosongan kopi pada proses penyangraian kopi berkurang.



Gambar 2. Desain Drum Roaster \*

Sumber : *Development And Evaluation Of Drum Coffee Roasting Machine For Small-Scale Enterprises*, Dadang Dayat Hidayat<sup>1)</sup> , Arie Sudaryanto<sup>1)</sup> , Yose Rizal Kurniawan<sup>1)</sup> , Ashri Indriati<sup>1)</sup> , Diang Sagita\*<sup>1)</sup> Research Centre for Appropriate Technology, Indonesian Institute of Sciences )

Gambar 2. Tampak kiri dan kanan sebuah desain Alat Roasting kopi



Sumber : *Development And Evaluation Of Drum Coffee Roasting Machine For SmallScale Enterprises*, Dadang Dayat Hidayat<sup>1)</sup> , Arie Sudaryanto<sup>1)</sup> , Yose Rizal Kurniawan<sup>1)</sup>, Ashri Indriati<sup>1)</sup>, Diang Sagita\* <sup>1)</sup> Research Centre for Appropriate Technology, Indonesian Institute of Sciences )

**Adapun Keunggulan dari penggunaan bahan tanah liat ini adalah:**

**1. Menjaga aroma kopi**

Silinder atau Tromol tanah liat ini tidak mengeluarkan aroma pada saat pemanasan yang akan mempengaruhi aroma kopi, dibandingkan ketika menggunakan plat stainless steel 304, unsur nikel pada bahan stainless steel 304 yang terpanaskan akan melepaskan aroma yang dapat mempengaruhi aroma asli kopi.

**2. Temperatur yang naik secara perlahan**

Temperatur atau suhu yang didapatkan atau pemanasannya tidak spontan, signifikan naiknya suhu berlangsung secara perlahan-lahan dibandingkan jika menggunakan plat stainless steel 304 yang bila diberi panas logam menjadi cepat panas. Daya hantar panas pada logam yang cepat dibandingkan tanah liat yang bersifat isolator. Proses ini sangat berpengaruh pada aroma dan rasa kopi.

**3. Bersifat Stabil**

Silinder tanah liat menyimpan panas lebih lama sehingga saat terjadi penurunan intensitas panas, temperatur turun dengan perlahan. Kita dapat mempertahankan suhu atau temperature dalam ruang sangrai tidak berfluktuasi sehingga suhu bersifat stabil. Kekurangan penggunaan silinder plat stainless steel 304 antara lain pada saat proses memasukkan biji kopi dari hopper ke ruang silinder pada suhu yang kita tetapkan misal 180°C, suhu pada silinder/ruang sangrai akan drop hingga 120°C, proses saat memasukkan biji kopi yang memiliki suhu kamar ke ruang sangrai terjadi absorpsi panas hingga tercapai keseimbangan temperatur.

yaitu terjadi penurunan suhu hingga 60°C atau 33% dari suhu awal, Kestabilan temperatur salah satu faktor penting dalam proses roasting kopi.

#### **4. Kearifan Lokal (*Local Culture*)**

Tanah liat sejak zaman dahulu menjadi bahan pembuatan peralatan masak seperti: gerabah, kuahi dan tempayan dari tanah liat oleh leluhur bangsa Indonesia untuk menyangrai kopi.

#### **c. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diambil dalam penerapan pembuatan alat/mesin roasting kopi sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengeringan biji kopi setelah dicuci agar pada proses penyangraian tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak banyak mengeluarkan asap pada saat disangrai.
2. Untuk silinder/tromol yang terbuat dari tanah liat perlu pengkajian lebih lanjut agar bisa tahan lama dan tidak pecah.